



# *Tinjauan Ekonomi* Kabupaten Magelang 2013



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG**

# *Tinjauan Ekonomi* **Kabupaten Magelang 2013**

Judul Buku :  
**TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN MAGELANG 2013**

Nomor Publikasi :

Ukuran Buku : Kwarto (21 x 28 cm)

Jumlah Halaman : vi+74 hal

Naskah :  
**Seksi Statistik Neraca Wilayah & Analisis Statistik**  
**Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang**

Gambar Kulit :  
**Seksi Statistik Neraca Wilayah & Analisis Statistik**  
**Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang**

Diterbitkan Oleh :  
**BAPPEDA Kabupaten Magelang**

Boleh dikutip dengan menyebut nama sumbernya

## KATA PENGANTAR

Proses pembangunan selalu berhadapan dengan keterbatasan sumberdaya pembangunan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan harus dilaksanakan dengan cermat dan akurat. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan indikator-indikator yang dapat menggambarkan situasi yang dihadapi dan dapat digunakan sebagai landasan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu disusunlah Buku Tinjauan Ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2013 yang menyajikan PDRB Kabupaten Magelang Tahun 2013.

Pengumpulan data dan penghitungan Pendapatan Regional dalam rangka penyusunan buku ini tidak mudah karena memerlukan ketelitian, kecermatan, kejelian dan keuletan para petugas karena kompleksitas aktivitas ekonomi di Kabupaten Magelang.

Kepada semua Instansi/ Dinas/ Lembaga baik pemerintah maupun swasta di Kabupaten Magelang yang telah membantu penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih, teriring harapan semoga buku ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pembangunan di Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, Agustus 2014

Plt. **KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN MAGELANG**

*Staf Ahli Bu*

**Drs. SU**

Pembina Tingkat I

NIP. 19640102 198405 1 004



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Grafik .....	vi
Bab I. Pendahuluan .....	1
1.1. Umum .....	1
1.2. Kelompok Sektor dan Pengelompokan Sektor Lapangan Usaha .....	2
1.3. Analisa dan Kegunaan Data PDRB .....	4
1.4. Sistematika Laporan .....	9
Bab II. Konsep Dan Definisi .....	11
2.1. Konsep Domestik dan Regional .....	11
2.2. Produk Domestik dan Produk Regional .....	11
2.3. Agregat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) .....	13
2.4. Agregat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).....	16
Bab III. Metode Penghitungan Pendapatan Nasional .....	21
3.1. Metode Pendekatan Produksi .....	21
3.2. Pendekatan Pendapatan .....	22
3.3. Pendekatan Pengeluaran .....	23
3.4. Metode Alokasi .....	24
Bab IV. Ulasan Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 2013 .....	27
4.1. PDRB Kabupaten Magelang .....	28
4.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang .....	28
4.3. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral .....	29
4.4. Indeks Perkembangan PDRB .....	31
4.5. Struktur Ekonomi Kabupaten Magelang .....	32
4.6. Indeks Berantai .....	33
4.7. Indeks Implisit PDRB .....	35
4.8. Inflasi .....	36
4.9. PDRB Per Kapita .....	37

4.10. PDRB Menurut Lapangan Usaha . . . . .	38
4.10.1. Sektor Pertanian.....	38
4.10.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian . . . . .	41
4.10.3. Sektor Industri Pengolahan . . . . .	43
4.10.4. Sektor Listrik, Gas dan Air Minum . . . . .	44
4.10.5. Sektor Bangunan . . . . .	45
4.10.6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.....	47
4.10.7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi . . . . .	50
4.10.8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan . . . . .	52
4.10.9. Sektor Jasa-Jasa.....	54
Bab V. Penutup . . . . .	59
Lampiran . . . . .	60

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Magelang, 2009-2013 (Persen) .....	30
Tabel 4.2. Indeks Perkembangan PDRB Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2009 -2013 .....	31
Tabel 4.3. Struktur Ekonomi Kabupaten Magelang, 2009 -2013 (Persen) ...	32
Tabel 4.4. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang, 2012 - 2013 .....	34
Tabel 4.5. Perubahan Indeks Implisit PDRB Kabupaten Magelang, 2009 -2013 (Persen) .....	35
Tabel 4.6. PDRB per Kapita Kabupaten Magelang, 2009 -2013 .....	38
Tabel 4.7. NTB Sektor Pertanian Kabupaten Magelang, 2011-2013 (Juta Rp).....	40

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 4.1. PDRB Kab. Magelang Harga Berlaku & Harga Konstan 2000, 2009-2013 .....	28
Grafik 4.2. Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang, 2009-2013 (Persen) .....	29
Grafik 4.3. Pertumbuhan Ekonomi Lapangan Usaha, 2013 .....	30
Grafik 4.4. Indeks Perkembangan PDRB Menurut Sektor, 2013 .....	32
Grafik 4.5. Struktur Ekonomi Kabupaten Magelang, 2013 .....	33
Grafik 4.6. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang, 2009 - 2013 .....	34
Grafik 4.7. Perubahan Inflasi PDRB, 2009-2013 .....	37
Grafik 4.8. NTB Sektor Pertanian Kabupaten Magelang, 2011 - 2013 (Milyar Rupiah) .....	41
Grafik 4.9. NTB Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Magelang, 2009-2013 (Milyar Rupiah) .....	42
Grafik 4.10. NTB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Magelang, 2009-2013 (Milyar Rupiah) .....	44
Grafik 4.11. NTB Sektor Listrik dan Air Minum di Kabupaten Magelang, 2009-2013 (Milyar Rupiah) .....	45
Grafik 4.12. NTB Sektor Bangunan di Kabupaten Magelang, 2009-2013 (Milyar Rupiah) .....	46
Grafik 4.13. NTB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di Kabupaten Magelang, 2009-2013 (Milyar Rupiah) .....	49
Grafik 4.14. NTB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi di Kabupaten Magelang, 2009-2013 (Milyar Rupiah).....	52
Grafik 4.15. NTB Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan di Kabupaten Magelang, 2009-2013 (Juta Rupiah) .....	54
Grafik 4.16. NTB Sektor Jasa-jasa di Kabupaten Magelang, 2009-2013 (Milyar Rupiah).....	58



# Pendahuluan

## *Introduction*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Umum**

Pembangunan di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan meningkatnya kesejahteraan semua penduduk.

Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah adalah mencapai pertumbuhan yang setinggi-tingginya, selain itu juga berupaya menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan mengurangi tingkat pengangguran dengan upaya untuk menciptakan kesempatan atau perluasan lapangan kerja bagi penduduk, agar setiap penduduk berkesempatan untuk menyejahterakan kehidupannya sendiri (Todaro dan Smith, 2004).

Dengan pembangunan dibidang ekonomi, maka diharapkan taraf penghidupan masyarakat menjadi lebih baik, tingkat kemakmuran semakin tinggi, ketimpangan pendapatan semakin berkurang, kesempatan kerja semakin terbuka dan juga kualitas sumber daya manusia akan terus membaik. Untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi yang telah dilaksanakan maka diperlukan adanya alat yang dapat membantu memberikan gambaran tingkat keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi tersebut.

Salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah tersedianya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan adanya data tersebut dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian daerah dan juga tingkat kemakmuran penduduk. Selain itu, bagi para pengambil keputusan sebelum menentukan kebijakan lebih lanjut, data PDRB dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan, analisa, dan evaluasi yang bermanfaat untuk menentukan sasaran pembangunan.

## **1.2. Kelompok Sektor Dan Pengelompokan Sektor Lapangan Usaha**

### **1.2.1. Kelompok Sektor**

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari kelompok sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Sedangkan yang dimaksud dengan kelompok sektor tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. KELOMPOK SEKTOR PRIMER :**

- a. Sektor Pertanian; dan
- b. Sektor Pertambangan dan Penggalian.

#### **2. KELOMPOK SEKTOR SEKUNDER :**

- a. Sektor Industri Pengolahan;
- b. Sektor Listrik, Gas dan Air bersih; dan
- c. Sektor Bangunan/Konstruksi.

#### **3. KELOMPOK SEKTOR TERSIER :**

- a. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran;
- b. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi;
- c. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; dan
- d. Sektor Jasa-jasa.

### **1.2.2. Pengelompokan Lapangan Usaha (Sektor)**

Dalam PDRB dengan tahun dasar 2000, sektor ekonomi dikelompokkan menjadi 9 sektor. Pengelompokan sektor tersebut berdasarkan pada :

1. Klasifikasi rekomendasi *System of National Account* (SNA).

Klasifikasi ini lebih umum dan bermanfaat membandingkan data PDRB dari suatu wilayah/daerah/*region* dengan wilayah/daerah/*region* lainnya baik secara total maupun sektoral.

2. Klasifikasi baru pada umumnya lebih terinci sektornya, dengan tujuan lebih berorientasi pada pengguna data (*data customer oriented*).

Pengelompokan sektor secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Sektor Pertanian,

meliputi subsektor : 1.1. Pertanian Tanaman Bahan Makanan

2.2. Pertanian Tanaman Perkebunan

2.3. Peternakan

2.4. Kehutanan

2.5. Perikanan

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian,

meliputi subsektor : 2.1. Pertambangan Minyak dan Gas

2.2. Pertambangan Bukan Minyak dan Gas

2.3. Penggalian

3. Sektor Industri Pengolahan,

meliputi subsektor : 3.1. Industri Minyak dan Gas

3.2. Industri Non Minyak dan Gas

4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih,

meliputi subsektor : 4.1. Listrik

4.2. Gas

4.3. Air Bersih

5. Sektor Bangunan / Konstruksi

6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran,

meliputi subsektor : 6.1. Perdagangan

6.2. Hotel

### 6.3. Restoran

## 7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi,

meliputi subsektor : 7.1. Angkutan

### 7.2. Komunikasi

## 8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan,

meliputi subsektor : 8.1. Bank

### 8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

### 8.3. Jasa Penunjang Keuangan

### 8.4. Sewa Bangunan

### 8.5. Jasa Perusahaan

## 9. Sektor Jasa-Jasa,

meliputi subsektor : 9.1. Pemerintahan Umum

### 9.2. Swasta

## 1.3. Analisa Dan Kegunaan Data PDRB

### 1.3.1. Analisa Data PDRB

Analisa data pada dasarnya dapat diartikan sebagai penjabaran atas pengukuran data kuantitatif menjadi suatu bentuk penyajian yang lebih mudah untuk ditafsirkan, sehingga analisa dapat diartikan sebagai berikut :

1. Menguraikan suatu masalah baik secara keseluruhan (*general*) ataupun secara sebagian (*partial*).
2. Memperhitungkan besarnya pengaruh perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya.

Dalam kaitannya dengan perhitungan PDRB, analisa dapat dilakukan dengan menurunkan parameter yang merupakan beberapa indikator ekonomi makro, seperti :

- Laju pertumbuhan ekonomi
- Struktur dari perekonomian

- Pendapatan per kapita
- Tingkat inflasi dan sebagainya

Parameter-parameter tersebut dapat diturunkan melalui tabel agregasi PDRB yang berupa nilai nominal. Untuk memperoleh informasi mengenai parameter yang akan dianalisa dapat digunakan metode statistik seperti :

- Distribusi persentase
- Indeks perkembangan
- Indeks berantai, dan
- Indeks implisit.

Tujuan utama dari analisa ini adalah untuk menggambarkan hasil penghitungan PDRB ke dalam bentuk yang relatif sederhana, dengan menggunakan pendekatan metode statistik deskriptif. Selain dari tujuan tersebut, analisa data PDRB juga bertujuan untuk :

1. Mempelajari pola ekonomi daerah;
2. Menguraikan pengaruh dari suatu kejadian terhadap kejadian lainnya dalam suatu daerah dan dalam waktu yang sama;
3. Melakukan perbandingan antar komponen;
4. Dasar evaluasi hasil pembangunan serta menentukan penyusunan kebijakan di masa mendatang.

### **1.3.2. Kegunaan Data PDRB**

Data PDRB dapat digunakan untuk mengetahui :

1. Pertumbuhan ekonomi, baik regional maupun sektoral

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung laju pertumbuhan (*Rate of growth*) dapat dipakai formula sebagai berikut :

$$G = \left[ \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1 \right] \times 100$$

dimana : G : Laju pertumbuhan  
 $P_t$  : PDRB adhk tahun ke-t  
 $P_{t-1}$  : PDRB adhk sebelum tahun ke-t

## 2. Tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah

Tinggi rendahnya tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah biasanya diukur dengan besar kecilnya angka pendapatan per kapita yang diperoleh dari pembagian antara pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, formulasinya sebagai berikut :

$$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}}$$

Dengan laju pertumbuhan per kapita yang positif dan tingkat pendapatan yang meningkat dan mantap, maka berarti kemakmuran masyarakat juga semakin meningkat.

## 3. Tingkat perubahan harga secara keseluruhan (Inflasi/Deflasi)

Pendapatan Regional/PDRB pada dasarnya merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah dalam waktu (tahun) tertentu. PDRB ini dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Sedangkan perbandingan antara harga berlaku dan harga konstan merupakan angka indeks implisit, yang mana dapat digunakan untuk mengetahui adanya perubahan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Indeks harga implisit dapat diperoleh/dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$I_{\text{Implisit}} = \frac{\text{PDRB}_{\text{adhb}}}{\text{PDRB}_{\text{adhk}}} \times 100$$

Sedangkan inflasi/deflasi berdasarkan perhitungan dari pendapatan regional/PDRB dapat di formulasikan sebagai berikut :

$$\text{Inflasi / Deflasi} = \left( \frac{I_{\text{implisit } t}}{I_{\text{implisit } t-1}} - 1 \right) \times 100$$

dimana :

$I_{\text{implisit}}$  = Indeks implisit

$I_{\text{implisit } t}$  = Indeks implisit tahun  $t$

$I_{\text{implisit } t-1}$  = Indeks implisit sebelum tahun  $t$

Inflasi atau deflasi merupakan gambaran tentang terjadinya perubahan harga, jika terjadi fluktuasi harga yang tidak menentu akan sangat berpengaruh terhadap daya beli konsumen/pembeli, jika terjadi kenaikan terus menerus maka konsumen akan merasakan pengaruhnya, karena berakibat terhadap ketidakseimbangan daya beli dengan pendapatan.

#### 4. Siklus Kegiatan Ekonomi

Apabila diperhatikan secara seksama, transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu : kelompok produsen dan kelompok konsumen.

Kelompok produsen menggunakan faktor produksi yang berasal dari kelompok konsumen dan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebaliknya barang dan jasa yang dihasilkan produsen dibeli oleh konsumen dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Kelompok konsumen memiliki :

- a. Faktor produksi berupa (Tanah, Tenaga, Modal dan Kewiraswastaan) yang diberikan kepada perusahaan



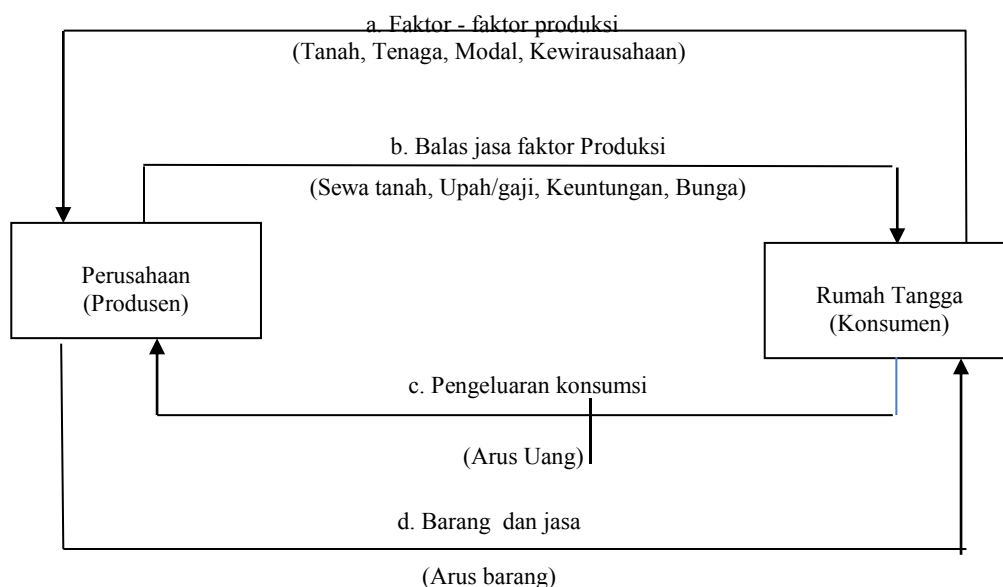
- b. Pengeluaran untuk membeli barang dan jasa dari produsen untuk dikonsumsi.

Sedangkan dari pihak produsen :

- a. Memberikan balas jasa kepada faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen, berupa sewa tanah, upah/gaji, bunga dan keuntungan.
- b. Pengadaan barang dan jasa hasil produksi yang dikonsumsi oleh pihak konsumen.

Transaksi dari kedua kelompok ini yang satu memakai barang dan jasa, dan satunya mengadakan barang dan jasa, sehingga berkesinambungan dan saling membutuhkan yang akhirnya membentuk suatu siklus perekonomian. Siklus ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut :

#### SIKLUS KEGIATAN EKONOMI



#### **1.4. Sistematika Laporan**

Sistematika penulisan publikasi ini disajikan dengan urutan sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan berisi tentang gambaran umum tentang PDRB, kelompok sektor dan pengelompokan sektor lapangan usaha, kegunaan data PDRB dan sistematika laporan
- Bab II. Konsep dan Definisi menjelaskan pengertian beberapa konsep dan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam publikasi ini.
- Bab III. Metode Penghitungan Pendapatan Regional berisi tentang metode penghitungan yang dipakai dalam masing-masing sektor atau sub sektor yaitu metode produksi, metode pendapatan, metode pengeluaran dan metode alokasi.
- Bab IV. Ulasan Ekonomi Kabupaten Magelang menjelaskan tentang PDRB Kabupaten Magelang, pertumbuhan ekonomi, indeks-indeks serta uraian PDRB menurut lapangan usaha.
- Bab V. Penutup yang berisi tentang kesimpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya.

# Konsep dan Definisi

*Concept And Definition*



## BAB II

### KONSEP DAN DEFINISI

Untuk menghindari penafsiran dan pengertian yang berbeda diantara pembaca, di bawah ini disampaikan beberapa pengertian dasar yang berkaitan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara umum PDRB dapat diartikan sebagai seluruh nilai produksi bruto/kotor atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua faktor produksi yang ada di suatu wilayah/*region* tertentu dan dihitung pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun).

#### 2.1. Konsep Domestik Dan Regional

Wilayah perekonomian yang digunakan sebagai acuan untuk membuat suatu perhitungan nasional adalah suatu negara, sedang untuk perhitungan suatu regional adalah suatu *region* dari suatu negara. Pengertian *region* disini dapat merupakan daerah propinsi atau daerah kabupaten/kota atau daerah administrasi yang lebih rendah lagi misalnya kecamatan atau desa/kelurahan.

#### 2.2. Produk Domestik Dan Produk Regional

##### 2.2.1. Produk Domestik

Adalah seluruh produk barang dan jasa dari hasil kegiatan ekonomi yang diproduksi di suatu wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk *region* tersebut atau tidak. Yang dimaksud dengan wilayah domestik suatu *region* adalah meliputi wilayah yang berada didalam batas geografis *region* tersebut (propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang melakukan kegiatan produksi disuatu *region* berasal dari *region* lain, demikian juga sebaliknya penduduk suatu *region* melakukan kegiatan proses produksi di *region* lain. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar *region* ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri / *region*) yang pada umumnya berupa upah, gaji, bunga, deviden/bunga dan

keuntungan, maka akan timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

### **2.2.2. Produk Regional**

Adalah merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu *region* atau (produk domestik ditambah dengan pendapatan yang diterima dari luar daerah/luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang dibayar ke luar daerah/ luar negeri).

### **2.2.3. Penduduk Suatu Daerah**

Adalah individu-individu atau anggota rumah tangga yang bertempat tinggal tetap di wilayah domestik region (daerah) tersebut.

Kecuali:

1. Wisatawan asing (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) yang tinggal di wilayah domestik daerah tersebut kurang dari 6 bulan atau yang bertujuan tidak menetap.
2. Awak dari kapal laut dan awak kapal udara luar negeri atau luar *region* yang sedang masuk dok atau singgah di daerah *region* tersebut.
3. Pengusaha asing dan pengusaha daerah lain yang berada di daerah tersebut kurang dari 6 bulan.
4. Anggota Korps Diplomat, Konsulat, yang ditempatkan di wilayah domestik daerah tersebut.
5. Pekerja musiman yang bekerja di wilayah domestik, yang bekerja sebagai pekerja musiman saja.
6. Pegawai Badan Internasional/Nasional yang bukan penduduk daerah tersebut yang melakukan misi kurang dari 6 bulan.

Orang-orang tersebut diatas dianggap sebagai penduduk dari negara atau daerah di mana dia biasanya bertempat tinggal.

#### 2.2.4. Penduduk Pertengahan Tahun

Yaitu jumlah penduduk pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan atau jumlah penduduk awal tahun ditambah penduduk akhir tahun dibagi dua.

Dalam menghitung pendapatan perkapita, pembagi dari produk domestik atau produk regional adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun, hal ini dilakukan sebab untuk menghindari kejadian vital (lahir, mati, datang dan pergi) yang fluktuatif tidak menentu sepanjang tahun, maka kita memakai penduduk pertengahan tahun dengan maksud agar jumlah penduduk tersebut betul-betul mencerminkan keadaan tahun tersebut. Selain itu karena PDRB dihitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

### 2.3. Agregat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

#### 2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB

Adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (*region*). Yang dimaksud dengan **Nilai Tambah** yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

Nilai Tambah Bruto (NTB) didapat dari Nilai Produksi (Output) dikurangi dengan Biaya Antara (BA). Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{NTB} = \text{NILAI PRODUKSI (OUTPUT)} - \text{BIAYA ANTARA}$$

- a) Komponen-komponen Nilai Tambah Bruto (NTB) antara lain :
1. Faktor pendapatan, terdiri dari :
    - Upah dan gaji sebagai balas jasa pegawai.
    - Bunga modal sebagai balas jasa modal.
    - Sewa tanah sebagai balas jasa tanah.
    - Keuntungan sebagai balas jasa kewirausahaan
  2. Penyusutan barang modal tetap.
  3. Pajak tidak langsung netto.
- b) Nilai Produksi (Output) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu. Barang dan jasa yang dihasilkan meliputi :
1. Produksi utama
  2. Produksi ikutan, maupun
  3. Produksi sampingan
- c) Biaya Antara (BA) adalah jenis biaya yang terdiri dari barang/jasa yang tidak tahan lama yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan barang tidak tahan lama adalah barang yang mempunyai suatu perkiraan umur penggunaan kurang dari 1 tahun.

Contoh :

- Bahan baku dan penolong untuk menghasilkan output.
- Peralatan dan perlengkapan kerja karyawan.
- Pengeluaran jasa kesehatan, obat-obatan dan rekreasi.
- Perbaikan kecil dan penggantian suku cadang yang aus.
- Iklan, Riset pemasaran dan hubungan masyarakat.
- Biaya administrasi.

### 2.3.2. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) ADHB

Perbedaan antara konsep netto ini dan konsep bruto diatas, ialah karena konsep bruto masih ada penyusutan di dalamnya, sedangkan untuk nettonya penyusutan harus dikeluarkan. Formulasinya sebagai berikut :

$$\text{PDRN ADHB} = \text{PDRB ADHB} - \text{Penyusutan}$$

Sedangkan penyusutan yang dimaksud disini adalah nilai atas susutnya (ausnya) barang-barang modal yang terjadi selama barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi.

### 2.3.3. PDRN Atas Dasar Biaya Faktor (PDRN ADBF)

Adalah PDRN ADHB dikurangi pajak tidak langsung netto. Pajak tidak langsung berupa pajak penjualan, bea ekspor/impor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perorangan.

Biasanya pemerintah memberikan subsidi kepada unit-unit produksi, yang akhirnya mengakibatkan penurunan harga (contoh subsidi pupuk, BBM, obat dan lain-lain). Karena ada subsidi tersebut maka pajak tidak langsung netto merupakan pajak tidak langsung dikurangi subsidi tersebut.

PDRN ADBF sebenarnya merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu *region* (daerah/wilayah). Jadi PDRN adbf merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa :

- Upah dan gaji sebagai balas jasa pegawai,
- Bunga modal sebagai balas jasa modal,
- Sewa tanah sebagai balas jasa tanah, dan
- Keuntungan sebagai balas jasa kewiraswastaan.

Namun demikian pendapatan yang dihasilkan tersebut diatas, tidak seluruhnya menjadi milik/pendapatan penduduk *region* tersebut, sebab ada pendapatan yang diterima oleh penduduk *region* lain atas kepemilikan faktor produksi di *region* tersebut.



#### 2.3.4. Pendapatan Regional

Pendapatan regional netto adalah PDRN ADBF dikurangi dengan pendapatan yang mengalir keluar *region* dan ditambah dengan pendapatan yang masuk dari *region* lain (*nett export*). Dengan kata lain bahwa produk *regional netto* (pendapatan regional) adalah jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh penduduk yang tinggal di *region*/wilayah/daerah di mana dia berdomisili.

#### 2.3.5. Pendapatan Perkapita (*Income Per Capita*)

Bila pendapatan-pendapatan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut, maka akan diperoleh suatu pendapatan perkapita, di antaranya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{a. PDRB ADHB perkapita} &= \frac{\text{PDRB ADHB}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}} \\ \text{b. PDRB ADHK perkapita} &= \frac{\text{PDRB ADHK}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}} \\ \text{c. } \textit{Income} \text{ perkapita} &= \frac{\text{Pendapatan regional}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}} \end{aligned}$$

#### 2.4. Agregat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Perkembangan PDRB ADHK dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan serta perubahan tingkat harganya. Sedangkan untuk dapat mengukur perubahan volume produk atau perkembangan produktifitas secara nyata, faktor pengaruh perubahan

harga perlu dihilangkan yaitu dengan cara menghitung PDRB atas dasar harga konstan.

Penghitungan atas dasar harga konstan ini, hasilnya dapat dipergunakan untuk perencanaan ekonomi, proyeksi dan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral. Dalam penghitungan atas dasar harga konstan ini, selalu berkaitan dengan harga-harga pada tahun dasar. Sebab harga-harga pada tahun dasar tersebut digunakan untuk menentukan angka indeks dasar yang besarnya = 100%, dan difungsikan sebagai pembanding harga-harga pada tahun-tahun tertentu yang akan diselidiki.

#### 2.4.1. Penghitungan Atas Dasar Harga Konstan

Secara konsep nilai atas dasar harga konstan dapat juga mencerminkan kuantum produksi pada tahun yang berjalan yang di nilai atas dasar harga pada tahun dasar. Dari segi metode statistik, suatu nilai atas dasar harga konstan dapat diperoleh dengan beberapa cara, sedangkan pemakaiannya sangat tergantung dari data yang tersedia di masing-masing sektor/sub sektornya. Cara yang lazim digunakan antara lain:

##### a. Revaluasi

*Revaluasi* diartikan menilai kembali produksi (kuantum) tahun berjalan dikalikan dengan harga tahun dasar, akan menghasilkan nilai produksi atas dasar harga konstan.

$$\text{Nilai Produksi ADHK} = Q_n^y + P_0$$

dimana:

$Q_n^y$  = Jumlah kuantum komoditi y pada tahun berjalan ( $t_n$ ).

$P_0$  = Harga komoditi y pada tahun dasar ( $t_0$ )

##### b. Ekstrapolasi

Yang perlu diperhatikan dengan cara ini ialah penentuan *ekstrapolator*-nya. *Ekstrapolator* yang paling baik adalah kuantum/jumlah produksi dari masing-masing sektor atau subsektor. Sedangkan nilai tambah adhk

yang dihitung dengan ekstrapolasi diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar dengan indeks kuantum dibagi 100. Indeks kuantum yang dipakai adalah Indeks Laspayers, dengan formulasi sebagai berikut :

$$IndeksKuantumLaspayers = \frac{Q_n \times P_0}{Q_0 \times P_n}$$

Nilai tambah bruto tahun berjalan ( $t_n$ ) adhk dapat dihitung sebagai berikut :

$$NTB_{adhk}^y = NTB_0^y \times \frac{IndeksKuantum_n^y}{100}$$

dimana :

$NTB_{adhk}^y$  = Nilai Tambah Bruto komoditi y pada tahun berjalan ( $t_n$ ).

$NTB_0^y$  = Nilai Tambah Bruto komoditi y pada tahun dasar ( $t_0$ ).

$IndeksKuantum_n^y$  = Indeks kuantum Laspayers y pada tahun berjalan ( $t_n$ ).

$Q_n$  = Jumlah / kuantum pada tahun berjalan ( $t_n$ ).

$Q_0$  = Jumlah / kuantum pada tahun berjalan ( $t_0$ ).

$P_0$  = Harga pada tahun dasar.

### c. Deflasi

NTB adhk yang diperoleh dengan cara ini ialah dengan *mendeflate* NTB adhb dengan indeks harga dari barang yang bersangkutan.

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan *mendeflate* adalah membagi nilai tambah adhb dengan indeks harga dari masing-masing sektor atau subsektor. Sehingga NTB adhk tahun berjalan komoditi y adalah :

$$NTB_{adhk}^y = \frac{NTB_{adhb}_n^y}{IndeksHarg a_n^y} \times 100$$

dimana :

$NTB_{adhk}^y$  = Nilai Tambah Bruto Atas dasar harga konstan komoditi y pada tahun berjalan ( $t_n$ ).

$NTB_{adhb}_n^y$  = Nilai Tambah Bruto Atas dasar harga berlaku komoditi y pada tahun berjalan ( $t_n$ ).

$IndeksH_{arg} a_n^y$  = Indeks Harga komoditi y pada tahun berjalan ( $t_n$ ).

#### d. Deflasi berganda

Disebut ganda karena dilakukan deflasi dua kali, yakni :

1. Membagi nilai produksi atas dasar harga berlaku dengan indeks harga produksi.
2. Membagi biaya antara atas dasar harga berlaku dengan indeks harga biaya antara.

Selisih antara nomor 1 dan 2 diatas merupakan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan. Bila diformulasikan akan terbentuk sebagai berikut :

$$NTB_{adhk}_n^y = \left[ \left( \frac{Q_n^y x P_n^y}{IndeksH_{arg} a_n^y} \right) - \left( \frac{Q_n^y x P_n^y}{IndeksH_{arg} a_n^{py}} \right) \right] \times 100$$

atau :

$$NTB_{adhk}_n^y = NP_0^y - BA_0^y$$

dimana :

$NTB_{adhk}_n^y$  = Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan komoditi y pada tahun berjalan ( $t_n$ )

$NP_0^y$  = Nilai produksi atas dasar harga konstan komoditi y

$BA_0^y$  = Nilai biaya antara atas dasar harga konstan komoditi y

# Metode Penghitungan

*Estimation Method*



## BAB III

### METODE PENGHITUNGAN PENDAPATAN REGIONAL

Penghitungan pendapatan regional kabupaten dapat dihitung melalui dua metode yaitu **metode langsung** dan **metode tidak langsung**. Yang dimaksud dengan metode langsung adalah metode penghitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah atau ada sumber datanya. Metode ini menggunakan 3 macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan produksi (*Production approach*).
2. Pendekatan pendapatan (*Income approach*).
3. Pendekatan pengeluaran (*Expenditure approach*).

Sedangkan metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi yaitu mengalokasikan pendapatan regional propinsi untuk kabupaten atau pendapatan regional kabupaten untuk kecamatan (dengan melihat beberapa *variabel* yang cocok untuk menghitung alokasi, contoh : jumlah penduduk, luas lahan, mata pencaharian, dan lain-lain). Penghitungan metode tidak langsung biasanya hanya ada satu metode yaitu metode alokasi (*allocation approach*).

#### 3.1. Metode Pendekatan Produksi

Pendekatan dari segi produksi adalah menghitung **nilai tambah** dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi **biaya antara** dari masing-masing **nilai produksi bruto** tiap-tiap sektor atau subsektor.

Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan nilai balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi.

Barang dan jasa yang diproduksi dengan harga produsen, yaitu yang belum termasuk biaya transport dan keuntungan pemasaran. Penggunaan harga produsen ini bertujuan untuk mengetahui nilai tambah yang benar-benar

diterima oleh produsen sedang biaya transport akan dihitung sebagai nilai tambah pada sektor transportasi dan keuntungan pemasaran akan dihitung pada sektor perdagangan. Nilai barang dan jasa pada harga produsen ini merupakan nilai produksi bruto, sebab masih terdapat biaya untuk memproduksi barang dan jasa yang dibeli dari sektor lain.

Nilai tambah bruto (NTB) adalah merupakan produk dari proses produksi, yang terdiri dari komponen-komponen di antaranya :

1. Faktor pendapatan, terdiri dari :
  - Upah dan gaji sebagai balas jasa pegawai.
  - Bunga modal sebagai balas jasa modal.
  - Sewa tanah sebagai balas jasa tanah.
  - Keuntungan sebagai balas jasa kewirausahaan.
2. Penyusutan barang modal tetap.
3. Pajak tidak langsung netto.

Sedangkan jika penyusutan dikeluarkan dari NTB maka akan diperoleh nilai tambah netto. Formulasi nilai tambah bruto dengan pendekatan produksi adalah :

$$\text{Nilai Tambah Bruto (NTB)} = \text{Nilai produksi bruto} - \text{Biaya antara}$$

Pendekatan ini banyak digunakan pada produksi yang berbentuk barang, seperti sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan dan lain-lain.

### 3.2. Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan dari segi pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi, yaitu:

- Upah dan gaji
- Surplus usaha

- Penyusutan
- Pajak tak langsung netto

Untuk pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha tidak diperhitungkan. Yang termasuk surplus usaha disini adalah bunga, sewa tanah dan keuntungan.

Hasil penjumlahan seluruh balas jasa faktor produksi tersebut akan diperoleh nilai tambah netto atas biaya faktor produksi. Sedangkan untuk memperoleh produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar harus ditambah dengan nilai penyusutan dan pajak tak langsung netto. Metode ini banyak dipakai pada sektor pemerintahan, bank/lembaga keuangan dan sektor jasa-jasa.

### 3.3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah kabupaten/kota. Jadi produk domestik regional dihitung dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang berbentuk produk domestik regional tersebut. Secara umum pendekatan pengeluaran dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut :

1. Melalui pendekatan penawaran yang terdiri dari metode arus barang, metode penjualan eceran dan metode penilaian eceran.
2. Melalui pendekatan permintaan yang terdiri dari pendekatan survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, metode anggaran rumah tangga, metode *balance sheet* dan metode statistik perdagangan luar daerah/luar negeri.

Pada prinsipnya kedua cara ini dimaksudkan untuk memperkirakan komponen-komponen permintaan akhir seperti :

- Konsumsi rumah tangga
- Konsumsi pemerintahan
- Konsumsi lembaga swasta non profit
- Perubahan stok



- Pembentukan modal bruto
- Perdagangan antar wilayah (termasuk ekspor dan impor).

Dengan menghitung komponen-komponen ini kemudian menjumlahkannya akan diperoleh produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku/pasar.

### **3.4. Metode Alokasi**

Metode alokasi pendapatan regional adalah menghitung pendapatan regional tingkat propinsi atau tingkat kabupaten dengan cara mengalokir angka pendapatan regional dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat di bawahnya, dengan menggunakan alokator tertentu.

Alokator yang dapat dipergunakan dapat didasarkan atas :

1. Nilai produksi bruto dan netto.
2. Jumlah produksi fisik.
3. Jumlah tenaga kerja.
4. Penduduk (bisa total maupun secara spesifik), dan
5. Alokator lain yang dianggap cocok untuk masing-masing daerah.

Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari alokator tersebut dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing daerah yang mendapat alokasi terhadap nilai tambah setiap sektor atau subsektor.

Mengenai kapan metode alokasi dipakai, adalah jika dari ketiga metode sebelumnya sudah tidak mungkin lagi diterapkan. Suatu contoh bila suatu unit produksi yang mempunyai kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat berlokasi di daerah lain, sedangkan kantor cabang ini tidak dapat mengetahui nilai tambah yang diperolehnya, oleh karena perhitungan neraca rugi/laba dilakukan oleh kantor pusat. Untuk mengatasi hal semacam itu, penghitungan nilai tambahnya terpaksa dilakukan dengan alokasi menggunakan indikator-indikator yang dapat menunjukkan peranan suatu cabang terhadap kantor pusat.

Dari keempat pengertian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jumlah pengeluaran dari berbagai kepentingan akan sama dengan produk akhir

dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dan juga akan sama dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat. Selanjutnya produk domestik regional bruto seperti yang dimaksudkan di atas disebut produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar (PDRB adhp).

# Ulasan Singkat

*Brief Review*



## **BAB IV**

### **ULASAN EKONOMI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013**

Selama tahun 2013 perekonomian nasional menunjukkan kondisi yang cukup stabil. Hal ini dapat ditunjukkan dari data beberapa indikator makro, seperti pertumbuhan ekonomi yang di atas laju inflasi, suku bunga bank dan nilai tukar rupiah yang relatif stabil. Meskipun demikian, perbaikan tersebut ternyata belum mampu menggerakkan sektor riil untuk tumbuh lebih baik. Pelaku dunia usaha masih tetap berkuat pada permasalahan harga bahan bakar minyak dan biaya produksi yang tinggi, pengupahan pekerja, persaingan usaha, dan sebagainya.

Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,78 persen. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama mencapai 5,81 persen, sedikit lebih tinggi dari angka nasional.

Laju inflasi nasional tahun 2013 sebesar 8,38 persen lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,30 persen. Demikian juga laju inflasi di Jawa Tengah tahun 2013 mencapai 7,98 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2012 sebesar 4,24 persen.

Sedangkan untuk Kabupaten Magelang pertumbuhan ekonomi tahun 2013 mencapai 5,60 persen, sedikit mengalami penurunan dari tahun 2012 yang tumbuh 5,84 persen. Laju inflasi tahun 2013 mencapai 8,49 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2012 yang hanya 2,59 persen.

Hasil pengolahan PDRB Kabupaten Magelang tahun 2013 menunjukkan pertumbuhan positif pada semua sektor. Sektor pertanian tumbuh sebesar 2,87 persen. Pertambangan dan penggalian sebesar 5,65 persen, Industri Pengolahan sebesar 6,39 persen, Listrik, gas dan air sebesar 8,39 persen, Konstruksi sebesar 7,57 persen, Perdagangan, hotel dan restoran sebesar 7,11 persen, Pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,55 persen, Keuangan, real estate dan jasa perusahaan sebesar 7,77 persen, dan Jasa-jasa sebesar 5,73 persen.

Untuk mengetahui gambaran selengkapnya tentang kondisi perekonomian di Kabupaten Magelang dapat dijelaskan pada uraian berikut.

**Grafik**

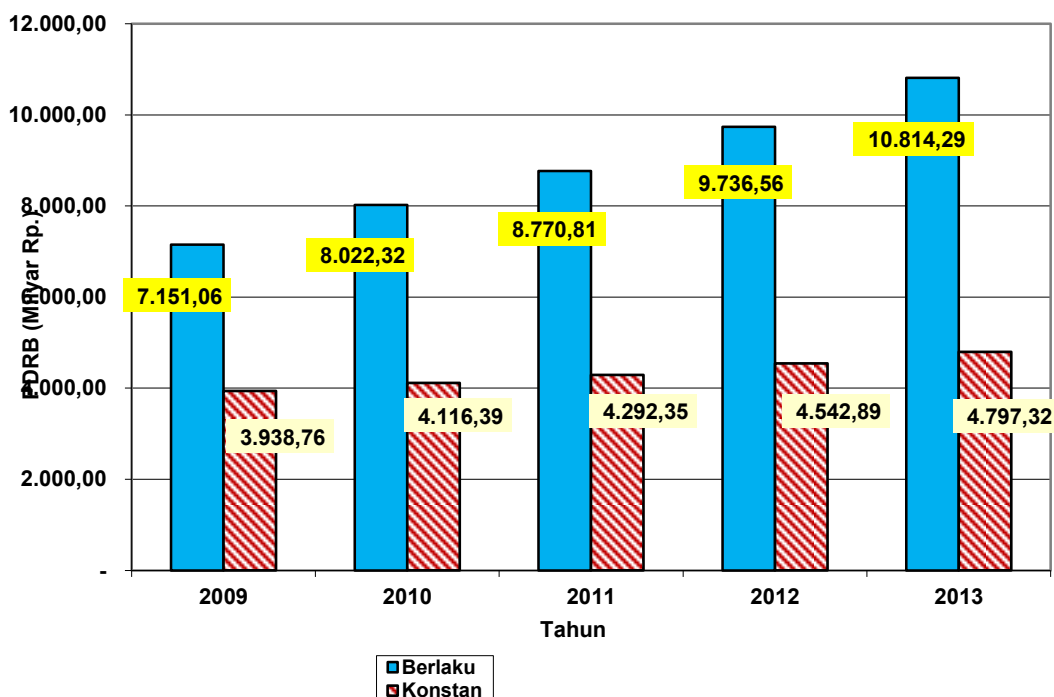
*Graphic*



#### 4.1. PDRB Kabupaten Magelang

Selama tahun 2009-2013, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan nilai PDRB Kabupaten Magelang selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku telah mencapai 10,814 trilyun rupiah, naik 1,5 kali dari tahun 2009 (7,151 trilyun rupiah). Sedangkan menurut harga konstan mencapai 4,797 trilyun rupiah pada tahun 2013, mengalami kenaikan 1,2 kali dari tahun 2009 (3,939 trilyun rupiah). Untuk lebih jelasnya perkembangan PDRB Kabupaten Magelang selama lima tahun terakhir bisa dilihat pada grafik di bawah ini.

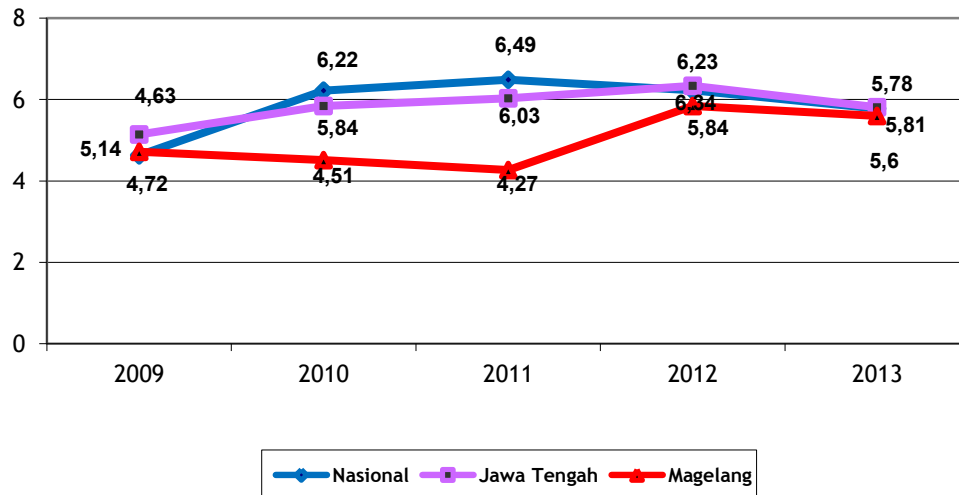
Grafik 4.1. PDRB Kab. Magelang Atas Dasar Harga Berlaku & Harga Konstan 2000, 2009-2013



#### 4.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang

Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang sebesar 5,60 persen, untuk Jawa Tengah 5,81 persen dan nasional 5,78 persen. Ilustrasi berikut memberi gambaran perbandingan pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang tahun 2009 - 2013.

Grafik 4.2. Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang, 2009-2013 (Persen)



Dari grafik di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional selama lima tahun terakhir adalah 5,87 persen, sedang Jawa Tengah 5,83 persen. Dengan rata-rata pertumbuhan 4,99 persen dapat disimpulkan bahwa posisi perekonomian Kabupaten Magelang masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional maupun Jawa Tengah.

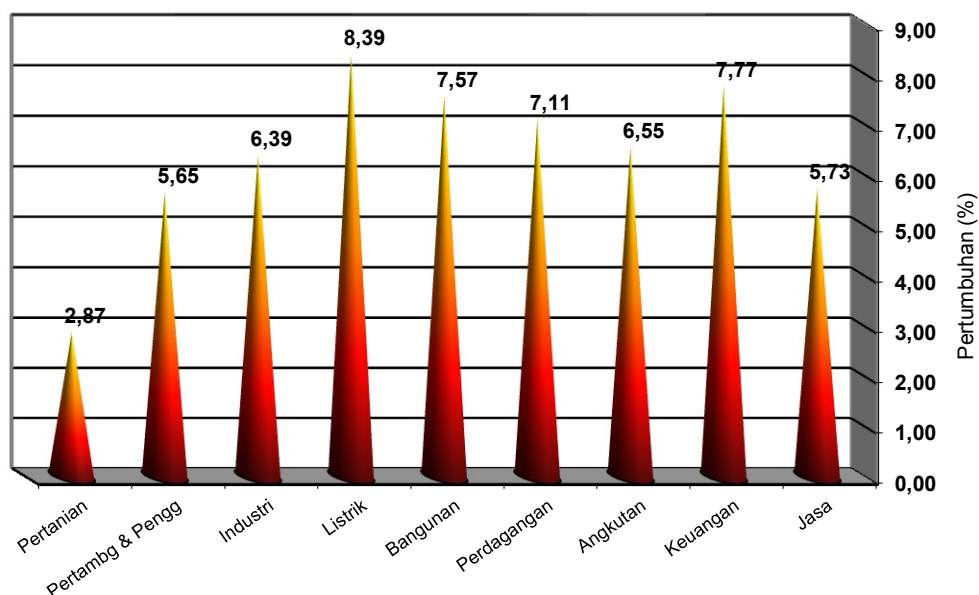
#### 4.3. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Laju pertumbuhan ekonomi setiap sektor dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 4.1. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Magelang, 2009-2013  
(Persen)

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	3,66	1,58	-0,19	3,18	2,87
2. Pertambangan & penggalian	7,47	7,58	8,66	6,32	5,65
3. Industri pengolahan	3,28	3,76	3,65	5,86	6,39
4. Listrik, gas dan air	4,40	8,26	4,56	5,81	8,39
5. Bangunan	6,74	7,06	8,48	7,08	7,57
6. Perdagangan, Hotel & Rest	3,27	4,54	3,86	6,45	7,11
7. Angkutan & Komunikasi	5,03	6,17	5,95	7,00	6,55
8. Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	3,54	4,05	4,96	5,59	7,77
9. Jasa-jasa	7,96	7,71	8,66	8,06	5,73
PDRB	4,72	4,51	4,27	5,84	5,60

Grafik 4.3. Pertumbuhan Ekonomi Lapangan Usaha, 2013



Dari tabel 4.1 dan grafik 4.3 dapat dilihat bahwa hampir semua sektor mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor



listrik, gas dan air minum, yaitu tumbuh 8,39 persen, kemudian sektor keuangan tumbuh 7,77 persen, diikuti sektor bangunan tumbuh 7,57 persen.

#### 4.4. Indeks Perkembangan PDRB

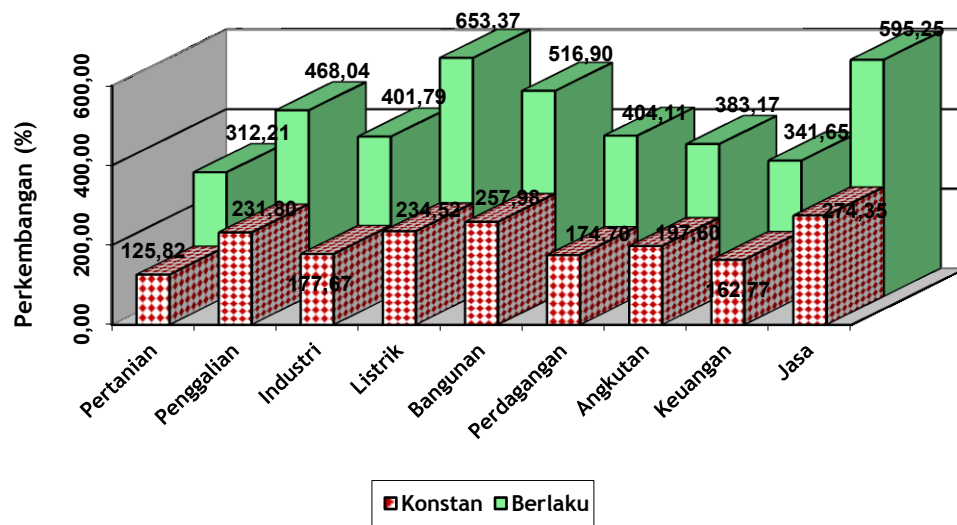
Untuk mengetahui perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang bila dihitung dari tahun dasar, dapat dilihat dari angka indeks perkembangan. Perkembangan PDRB Kabupaten Magelang dari tahun dasar (2000) sampai tahun 2013 menurut harga berlaku mencapai 401,95 persen, sedangkan secara riil baru mencapai 178,31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sampai tahun 2013 menurut harga berlaku terjadi peningkatan PDRB sebesar 4,02 kali sedangkan secara riil hanya ada peningkatan PDRB sebesar 1,78 kali.

Secara umum semua sektor mengalami kenaikan yang tinggi bila dilihat atas dasar harga berlaku. Sedangkan menurut harga konstan perkembangan tertinggi terjadi pada sektor jasa-jasa mencapai 274,35 persen, sedang yang terendah perkembangannya adalah sektor pertanian yang hanya mencapai 125,82 persen.

Tabel 4.2. Indeks Perkembangan PDRB Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2009-2013

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	116,93	118,77	118,54	122,31	125,82
2. Pertambangan & penggalian	176,54	189,92	206,37	219,40	231,80
3. Industri pengolahan	146,68	152,20	157,76	167,00	177,67
4. Listrik, gas dan air	180,64	195,56	204,49	216,37	234,52
5. Bangunan	192,84	206,46	223,97	239,82	257,98
6. Perdagangan, Hotel & Rest	141,11	147,52	153,21	163,10	174,70
7. Angkutan & Komunikasi	154,08	163,59	173,32	185,45	197,60
8. Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	130,97	136,28	143,04	151,03	162,77
9. Jasa-jasa	205,17	220,99	240,13	259,48	274,35
PDRB	144,31	153,00	159,54	168,85	178,31

Grafik 4.4. Indeks Perkembangan PDRB Menurut Sektor, 2013

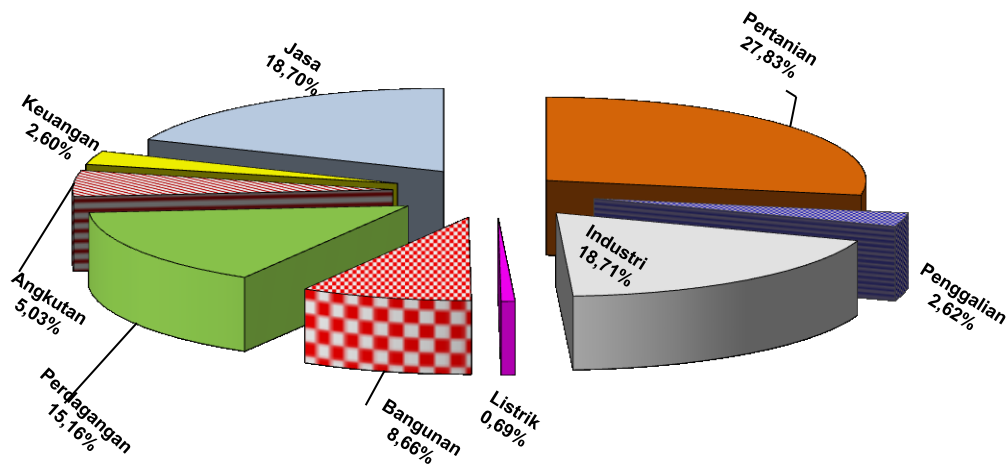


#### 4.5. Struktur Ekonomi Kabupaten Magelang

Tabel 4.3. Struktur Ekonomi Kabupaten Magelang, 2009-2013 (Persen)

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	29,38	29,60	28,79	28,31	27,83
2. Pertambangan & penggalian	2,57	2,54	2,61	2,58	2,62
3. Industri pengolahan	18,49	18,00	18,27	18,59	18,71
4. Listrik, gas dan air	0,69	0,68	0,67	0,66	0,69
5. Bangunan	8,38	8,29	8,50	8,57	8,66
6. Perdagangan, Hotel & Rest	15,00	15,04	14,99	15,19	15,16
7. Angkutan & Komunikasi	5,18	5,05	5,07	5,03	5,03
8. Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	2,76	2,67	2,62	2,55	2,60
9. Jasa-jasa	17,54	18,13	18,51	18,51	18,70
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Grafik 4.5. Struktur Ekonomi Kabupaten Magelang, 2013

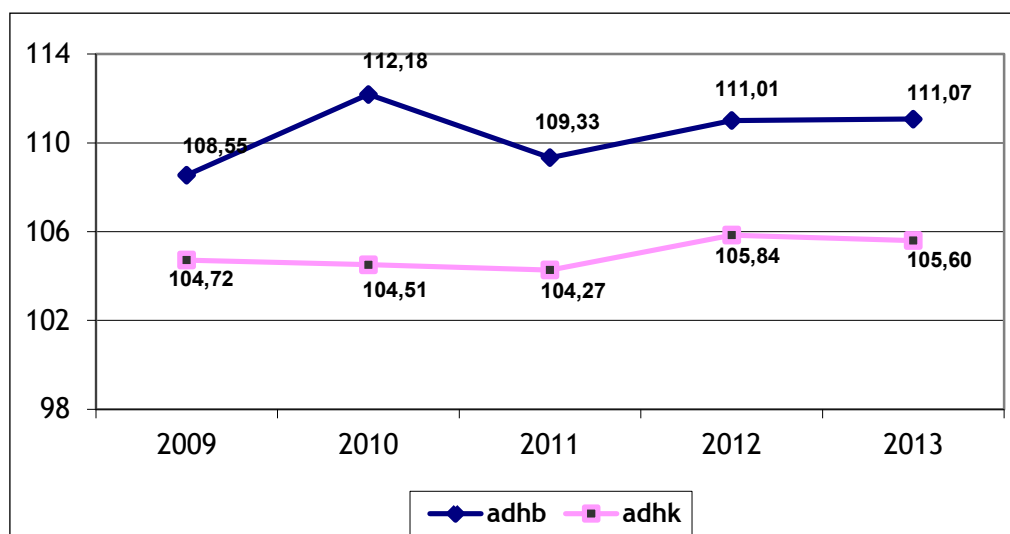


Struktur perekonomian di Kabupaten Magelang dapat ditunjukkan oleh besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB kabupaten. Dari tabel maupun grafik di atas dapat dilihat bahwa menurut harga berlaku, pada tahun 2013 sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Magelang yaitu sebesar 27,83 persen, disusul sektor industri pengolahan sebesar 18,71 persen. Kontribusi terbesar ketiga diberikan oleh sektor jasa-jasa sebesar 18,70 persen. Sektor listrik dan air minum memberikan sumbangan terkecil yaitu hanya 0,69 persen.

#### 4.6. Indeks Berantai

Angka-angka PDRB juga dapat menunjukkan perkembangan secara agregat/per sektor per tahun yaitu dengan membuat tabel turunannya yang berupa tabel indeks berantai baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan. Pergerakan indeks ini mencerminkan perkembangan secara riil masing-masing sektor, dengan demikian indeks berantai adalah juga merupakan laju pertumbuhan PDRB apabila indeks tersebut dikurangi 100.

Grafik 4.6. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto  
Kabupaten Magelang, 2009-2013



Tabel 4.4. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto  
Kabupaten Magelang, 2012-2013

Lapangan Usaha / Sektor	atas dasar harga berlaku		atas dasar harga konstan 2000	
	2012	2013	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	109,25	109,17	103,18	102,87
2. Pertambangan dan Penggalian	109,61	113,09	106,32	105,65
3. Industri Pengolahan	112,98	111,80	105,86	106,39
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	109,26	115,03	105,81	108,39
5. Konstruksi / Bangunan	111,96	112,13	107,08	107,57
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	112,52	110,81	106,45	107,11
7. Angkutan dan Komunikasi	110,13	111,09	107,00	106,55
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	108,43	113,02	105,59	107,77
9. Jasa-Jasa	111,01	112,26	108,06	105,73
PDRB	111,01	111,07	105,84	105,60

Dari hasil pengolahan PDRB tahun 2013, indeks berantai yang terjadi di Kabupaten Magelang adalah sebesar 111,07 persen adhb dan 105,60 persen adhk. Atas dasar harga berlaku menurut sektoral, indeks berantai tertinggi dicapai oleh sektor listrik, air dan gas yakni sebesar 115,03 persen dan terendah adalah sektor pertanian hanya mencapai 109,17 persen. Sedangkan menurut harga konstan indeks tertinggi adalah sektor listrik, air dan gas yaitu 108,39 persen dan terendah sektor pertanian hanya 102,87 persen.

#### 4.7. Indeks Implisit PDRB

Dari angka-angka indeks implisit PDRB dapat diketahui besarnya perubahan indeks harga dari waktu ke waktu. Tabel di bawah memperlihatkan perbandingan tingkat perubahan indeks implisit dari tahun 2009-2013. Untuk tahun 2013 perubahan indeks implisit tertinggi terjadi pada sektor listrik, gas dan air minum sebesar 16,08 persen, disusul sektor pertanian sebesar 14,33 persen.

Tabel 4.5. Perubahan Indeks Implisit PDRB Kabupaten Magelang, 2009-2013  
(Persen)

Lapangan Usaha/Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	8,26	20,99	13,45	12,99	14,33
2. Pertambangan dan Penggalan	3,39	5,07	5,93	5,66	13,29
3. Industri Pengolahan	6,57	9,39	13,31	13,56	10,95
4. Listrik, Gas dan Air Minum	7,62	6,02	8,19	8,29	16,08
5. Bangunan / Konstruksi	3,38	6,21	5,96	8,37	8,14
6. Perdagangan, Restoran dan Hotel	6,85	14,26	9,85	12,06	7,72
7. Pengangkutan dan Komunikasi	3,68	5,04	6,11	5,29	7,92
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,45	7,41	4,21	5,25	9,76
9. Jasa - jasa	6,26	13,81	5,19	5,43	12,63
PDRB	6,42	13,33	9,45	9,99	11,10

#### 4.8. Inflasi

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau *stagnan*. Kondisi tersebut dapat terlihat secara umum dari besaran inflasi atau deflasi. Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat sebab nilai uang yang dibelanjakan turun, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan akibat selanjutnya akan menimbulkan resesi ekonomi.

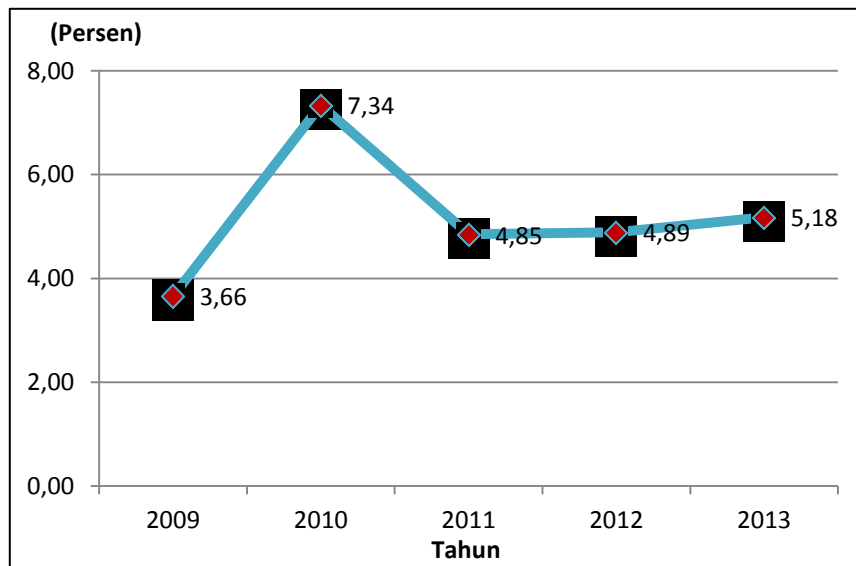
Inflasi selain dihitung dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menggunakan sampel lebih kurang 322 komoditi, seperti yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, yang dihitung baik setiap bulan maupun setiap tahun, juga bisa dihitung dengan memakai indek implisit PDRB.

Dari kedua metode tersebut hasilnya tidak akan sama, sebab komoditi yang diamati jumlahnya berbeda serta metodologinya juga berlainan. Untuk penghitungan inflasi dengan metode implisit dari PDRB dapat diformulasikan sebagai berikut :

**Membagi indeks implisit tahun (t) dengan indeks implisit tahun (t-1)  
dikurangi satu dikalikan seratus persen**

Dari hasil pengolahan didapatkan, pada tahun 2013 terjadi inflasi sebesar 5,18 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Grafik 4.7. Perubahan Inflasi PDRB, 2009-2013



#### 4.9. PDRB Per Kapita

Salah satu alat untuk mengukur atau menilai tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah besarnya nilai pendapatan per kapita. Dalam hal ini dilakukan pendekatan melalui penghitungan PDRB per kapita. Selama tahun 2009-2013 perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Kenaikan PDRB per kapita terbesar lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2010 (Tabel 4.6) sebesar 11,49%. Sedangkan untuk harga konstan kenaikan PDRB per kapita tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,40%.

Tabel 4.6. PDRB Per Kapita Kabupaten Magelang, 2009-2013

Tahun	PDRB Per Kapita (Rupiah)		Pertumbuhan (%)	
	Berlaku	Konstan 2000	Berlaku	Konstan 2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009	6 084 654,82	3 351 395,72	7,89	4,07
2010	6 784 073,12	3 481 023,26	11,49	3,87
2011	7 371 214,15	3 607 405,54	8,65	3,63
2012	7 984 900,72	3 725 600, 05	8,33	3,28
2013	8 851 975,08	3 926 818,06	10,86	5,40

#### 4.10. PDRB Menurut Lapangan Usaha

##### 4.10.1.Sektor Pertanian

##### 1. Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan

Sub sektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedele, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman pangan lainnya dan hasil-hasil produk ikutannya.

Data produksi padi, palawija, sayuran dan buah-buahan tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang, sedangkan data harga bersumber dari data harga yang dikumpulkan oleh BPS.

Nilai tambah bruto (NTB) atas dasar harga berlaku diperoleh dengan pendekatan produksi yaitu dengan cara mengalikan setiap jenis kuantum produksi dengan harga masing-masing komoditas, kemudian hasilnya dikurangi dengan nilai biaya antara atas dasar harga berlaku.

Nilai tambah bruto (NTB) atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan produksi pada tahun yang dihitung dengan harga pada tahun 2000, kemudian dikurangi dengan biaya antara atas dasar harga konstan 2000.



## **2. Sub Sektor Perkebunan**

Tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Magelang adalah tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat yang meliputi jenis tanaman tebu, tembakau, kopi, kelapa dan cengkeh. Produksi jenis-jenis tanaman perkebunan tersebut diperoleh dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang. Data harga masing-masing komoditas perkebunan juga diperoleh dari juga Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang serta dari survei harga pedesaan oleh BPS.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara pendekatan produksi. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi.

## **3. Sub Sektor Peternakan dan Hasil-hasilnya**

Sub sektor ini mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas serta hasil-hasil ternak, antara lain sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, telur dan susu segar. Produksi ternak dihitung dengan menjumlahkan ternak yang dipotong ditambah perubahan stok populasi ternak dan ekspor ternak neto.

Data ternak, produksi susu dan telur diperoleh dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, sedangkan data harga ternak serta pemotongan dan hasil-hasil ternak diperoleh dari BPS.

## **4. Sub Sektor Kehutanan**

Sub sektor kehutanan mencakup dua jenis kegiatan yaitu penebangan kayu dan pengambilan hasil hutan lainnya. Kegiatan penebangan kayu menghasilkan kayu gelondongan, kayu bakar, arang dan bambu, sedangkan hasil kegiatan pengambilan hasil hutan lainnya berupa kulit kayu, akar-akaran dan sebagainya.

Output sub sektor kehutanan dihitung dengan mengalikan produksi dan harga setiap komoditi. Nilai tambah bruto dihitung dengan mengalikan output dengan rasio nilai tambah.

Data produksi hasil hutan maupun data harga diperoleh dari KPH Kedu Utara Magelang dan Dinas BPPKP Kabupaten Magelang.

## 5. Sub Sektor Perikanan

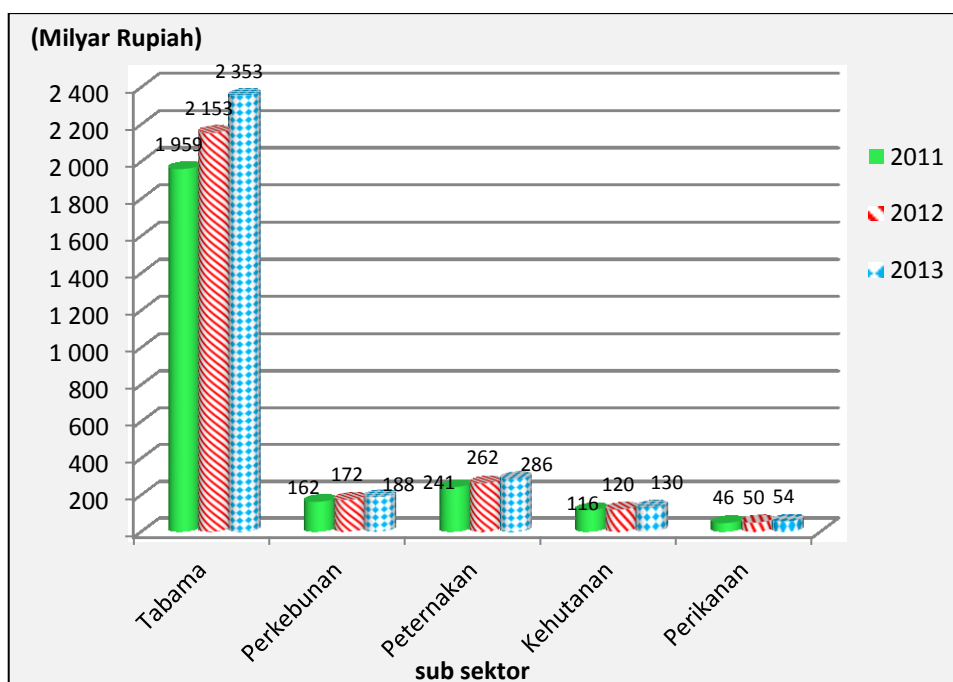
Sub sektor perikanan meliputi kegiatan perikanan darat. Data produksi perikanan dan data harga produksi diperoleh dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang. Kegiatan perikanan darat meliputi hasil penangkapan ikan di perairan umum seperti sungai dan waduk serta pemeliharaan ikan baik di tambak maupun di kolam-kolam.

Nilai produksi perikanan diperoleh dengan mengalikan produksi dengan harga masing-masing komoditi. Nilai tambah bruto diperoleh dengan mengalikan nilai produksi dengan rasio nilai tambah. Untuk mengetahui perkembangan nilai tambah bruto (NTB) sektor pertanian dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 4.7. NTB Sektor Pertanian Kabupaten Magelang, 2011-2013 (Juta Rp)

Rincian	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Berlaku</u>			
1 Tabama	1 959 213,57	2 153 490,67	2 353 155,16
2 Perkebunan	161 710,30	172 326,59	187 701,33
3 Peternakan	241 442,82	261 872,61	285 766,68
4 Kehutanan	115 687,86	119 804,32	129 679,63
5 Perikanan	45 796,37	49 841,29	53 912,01
	2 523 850,92	2 757 335,48	3 010 214,81
<u>Konstan</u>			
1 Tabama	851 581,29	878 851,54	901 516,04
2 Perkebunan	76 984,72	79 927,76	83 351,22
3 Peternakan	130 552,82	135 820,30	142 437,44
4 Kehutanan	59 034,64	58 454,27	58 723,37
5 Perikanan	24 759,4	26 204,68	27 048,02
	1 142 912,87	1 179 258,55	1 213 076,09

Grafik 4.8. NTB Sektor Pertanian Kabupaten Magelang, 2011-2013  
(Milyar Rupiah)



Dari tabel dan grafik di atas nampak jelas bahwa pada tahun 2013 sub sektor tabama memberikan kontribusi NTB mencapai 78,17 persen, terbesar dibandingkan sub sektor lainnya. Kemudian disusul oleh sub sektor peternakan sebesar 9,49 persen.

#### 4.10.2. Sektor Pertambangan Dan Penggalian

Di wilayah Kabupaten Magelang sektor pertambangan dan penggalian pada umumnya adalah penggalian yang dilakukan oleh pengusaha golongan C seluruhnya. Sumbangan sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2013 hanya 2,62 persen.

Untuk menghitung Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor penggalian ini, dilakukan survei khusus pendapatan regional sektor penggalian secara sampel, dan juga data-data dari dinas terkait. Dari hasil survei tersebut akan didapatkan keterangan mengenai karakteristik usaha penggalian antara lain struktur biaya perusahaan, nilai produksi dan lain-lainnya.

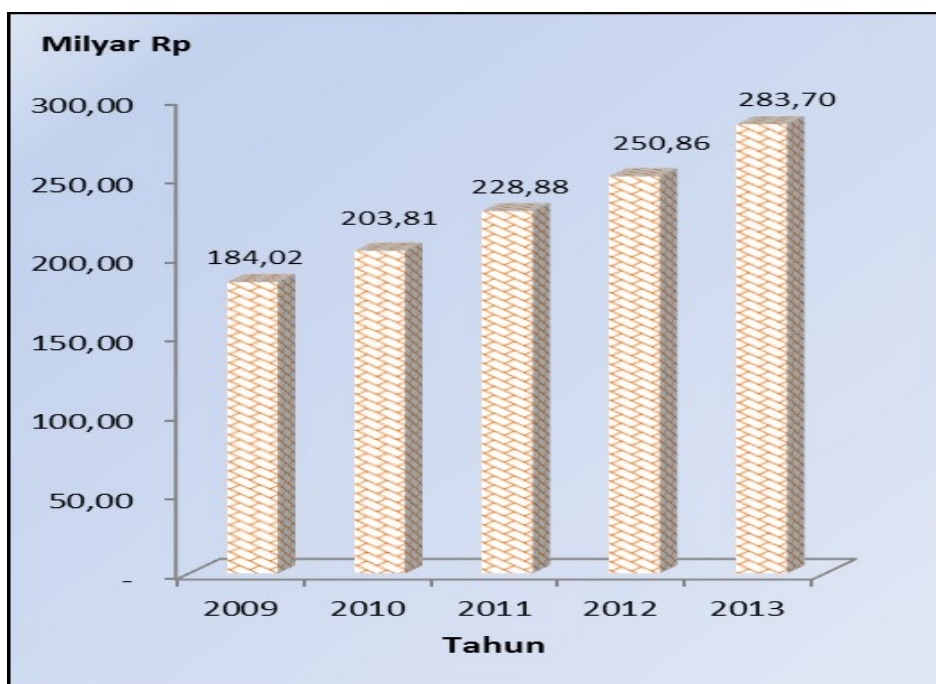
Dengan menggunakan metode produksi, output kegiatan penggalian diperoleh berdasarkan perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan

dengan harga per unit barang tersebut, ditambah nilai jasa lainnya yang merupakan produk sampingan usaha penggalian tersebut. Biaya antara kegiatan penggalian terdiri dari nilai pemakaian barang dan jasa yang dipergunakan dalam kegiatan ini. Barang dan jasa ini merupakan barang dan jasa yang habis dipakai dalam proses produksi, usia pemakaiannya kurang dari satu tahun, serta nilai per unitnya relatif kecil. Jenis barang yang dikategorikan sebagai biaya antara kegiatan penggalian antara lain adalah : cangkul, linggis, sekop, palu, pikulan, keranjang, ember dll.

Untuk mengetahui besarnya nilai tambah bruto dapat diperoleh dengan mengurangi nilai output dengan biaya antara. Perhitungan output dan nilai tambah atas dasar harga konstan untuk penggalian menggunakan metode revaluasi. Untuk mengetahui perkembangan output sektor pertambangan dan penggalian selama tiga tahun terakhir dapat diperhatikan pada grafik di bawah ini.

Selama tahun 2009 sampai 2013 NTB sektor penggalian mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 NTB sektor penggalian mencapai 283,7 milyar rupiah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 4.9. NTB Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Magelang, 2009-2013 (Milyar Rupiah)



#### 4.10.3. Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan berdasarkan jenis barang yang dihasilkan dirinci menjadi sembilan sub sektor yaitu industri makanan, minuman dan tembakau; industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki; industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya; industri kertas dan barang cetakan; industri pupuk, kimia dan barang dari karet; industri semen dan barang lain bukan logam; industri logam dasar besi dan baja; industri alat angkutan, mesin dan peralatan serta industri barang lainnya yang belum tercakup di sub-sub sektor di atas.

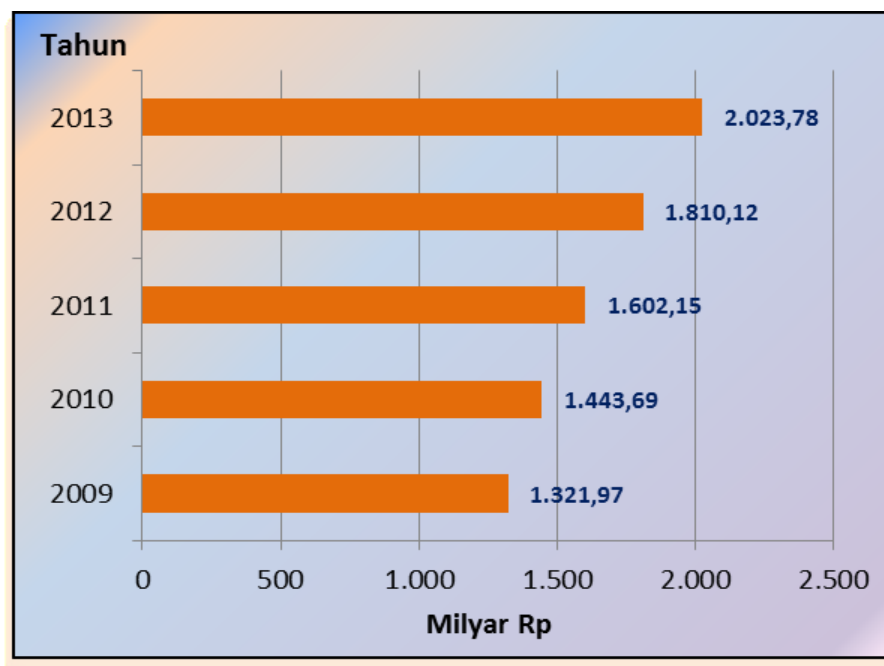
Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini, sektor industri pengolahan dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu :

- Industri Besar, jumlah tenaga kerja sama dengan atau lebih dari 100 orang;
- Industri Sedang, jumlah tenaga kerja 20-99 orang;
- Industri Kecil, jumlah tenaga kerja 5-19 orang;
- Kerajinan Rumah Tangga, jumlah tenaga kerja 1-4 orang.

Sumber data untuk industri besar dan sedang diperoleh dari hasil pengolahan Survei Industri Besar/Sedang yang dilaksanakan oleh BPS setiap tahun. Dari hasil survei tersebut dapat diperoleh data output, biaya antara dan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dengan metode deflasi, dengan menggunakan indeks harga perdagangan besar yang sesuai sebagai deflatornya.

Untuk industri kecil dan kerajinan rumah tangga data diperoleh dari hasil pengolahan survei usaha terintegrasi yang dilaksanakan oleh BPS secara sampel terhadap berbagai kegiatan ekonomi non pertanian setiap tahunnya. Dari hasil survei tersebut dapat diperoleh berbagai data indikator seperti output per usaha, output per tenaga kerja dan sebagainya. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan metode deflasi, dengan menggunakan indeks harga perdagangan besar yang sesuai sebagai deflatornya. Grafik berikut memberikan gambaran NTB dari sektor industri pengolahan yang berada di Magelang selama tiga tahun (2009-2013).

Grafik 4.10. NTB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Magelang, 2009-2013 (Milyar Rupiah)



Selama periode 2009-2013 NTB sektor industri pengolahan selalu meningkat. Bahkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 11,8 persen dari tahun sebelumnya.

#### 4.10.4. Sektor Listrik, Gas & Air Minum

Sektor ini meliputi tiga sub sektor, yaitu:

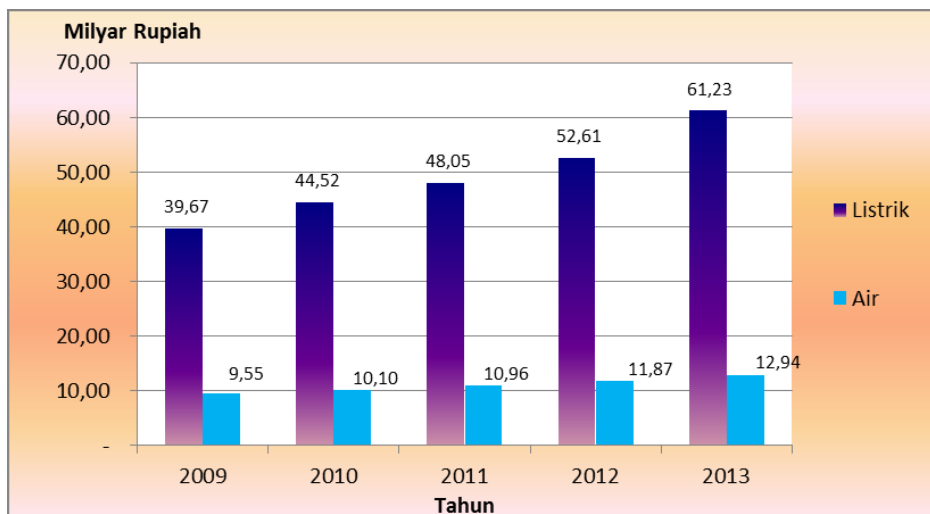
1. Sub Sektor Listrik
2. Sub Sektor Gas
3. Sub Sektor Air Minum

Dari ketiga sub sektor di atas, di Kabupaten Magelang hanya dua sub sektor yaitu sub sektor listrik dan sub sektor air minum. Pada sub sektor listrik, aktifitas yang dicakup meliputi usaha listrik yang diusahakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sedangkan sub sektor air minum meliputi kegiatan penjernihan air minum yang dikelola oleh perusahaan air minum yang merupakan publik servis.

Data tentang kelistrikan diperoleh dari PLN cabang Magelang dan data dari air minum diperoleh dari PDAM Kabupaten Magelang.

Nilai produksi atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian produksi dan harga berlaku. Nilai produksi atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu dengan menilai pemakaian atau penggunaan banyaknya KWH yang terjual pada tiap-tiap tahun dengan tarip tahun 2000.

Grafik 4.11. NTB Sektor Listrik Dan Air Minum di Kabupaten Magelang, 2009-2013 (Milyar Rupiah)



Selama tahun 2009-2013 NTB sub sektor listrik mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 39,67 milyar rupiah pada tahun 2009 menjadi 61,23 milyar rupiah pada tahun 2013. Sedangkan untuk sub sektor air minum hanya mengalami sedikit peningkatan output dari 9,55 milyar rupiah pada tahun 2009 menjadi 12,94 milyar rupiah pada tahun 2013.

#### 4.10.5. Sektor Bangunan

Sektor bangunan mencakup kegiatan kontruksi di wilayah Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan kontruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi.

Yang dimaksud dengan kegiatan konstruksi adalah pembuatan, pembangunan, pemasangan dan perbaikan (berat atau ringan) semua jenis konstruksi seperti bangunan tempat tinggal, jalan, jembatan, terminal, instalasi jaringan listrik, air, telepon serta bangunan lainnya. Untuk menghitung

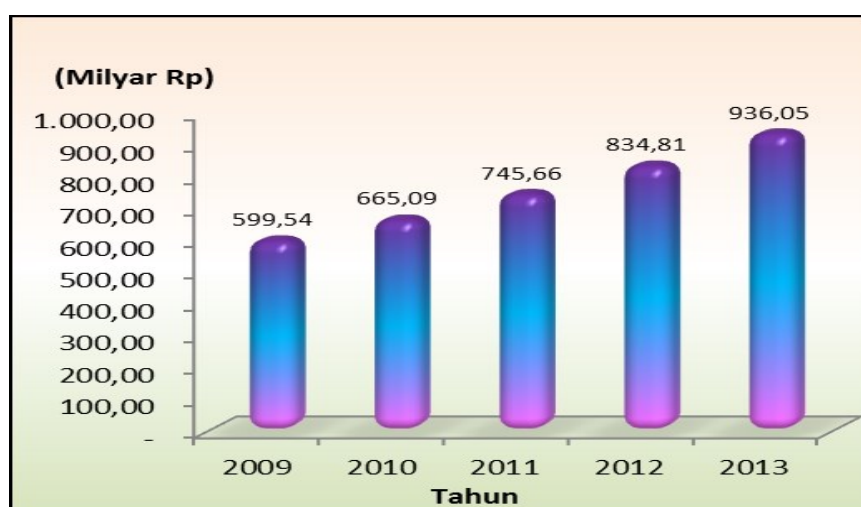
nilai tambah sektor bangunan menggunakan pendekatan produksi. Pendekatan ini dipakai untuk memperoleh nilai tambah sektor bangunan dengan cara output sektor tersebut dikurangi dengan biaya antara. Untuk mengestimasi output sektor bangunan ada dua alternatif :

1. Meneliti perusahaan bangunan/konstruksi yang berdomisili di Kabupaten Magelang.
2. Meneliti perusahaan bangunan/konstruksi yang membangun/mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Magelang.

Pada alternatif pertama output di definisikan sebagai jumlah nilai pendapatan dari seluruh perusahaan konstruksi yang berdomisili di Kabupaten Magelang tanpa memperhatikan apakah kegiatan/proyeknya di dalam atau di luar Kabupaten Magelang. Sedang pada alternatif kedua, output didefinisikan sebagai jumlah nilai seluruh bangunan/konstruksi yang dikerjakan di Kabupaten Magelang, tanpa memperhatikan lokasi perusahaan itu berada.

Output dari kegiatan konstruksi satu tahun atas dasar harga berlaku adalah nilai semua pekerjaan yang telah dikerjakan di Kabupaten Magelang satu tahun tersebut tanpa memperhatikan bangunan yang dikerjakan tersebut sudah selesai atau belum. Nilai output dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan indeks harga perdagangan besar sebagai deflatornya.

Grafik 4.12. NTB Sektor Bangunan Di Kabupaten Magelang, 2009-2013 (Milyar Rupiah)





Dari grafik 4.12 di atas dapat diketahui bahwa NTB sektor bangunan di Kabupaten Magelang pada tahun 2013 meningkat menjadi 936,05 milyar rupiah dari tahun 2009 hanya 599,54 milyar rupiah.

#### **4.10.6. Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran**

Sektor perdagangan dalam penghitungan PDRB adalah semua balas jasa yang diterima oleh pedagang besar, pedagang kecil, rumah makan dan sebagainya. Adapun barang dagangan yang dimaksud ada yang berasal dari daerah sendiri maupun dari daerah luar Kabupaten Magelang.

Sektor ini terdiri dari tiga sub sektor yaitu sub sektor perdagangan besar dan eceran, hotel dan sub sektor restoran/rumah makan. Pada dasarnya kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan perdagangan, penyediaan akomodasi/hotel serta penjualan makanan dan minuman (seperti restoran, warung, kedai, pedagang keliling dan sejenisnya).

##### **1. Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran**

Sub sektor perdagangan mencakup kegiatan membeli dan menjual barang, baik barang baru maupun bekas, untuk tujuan penyaluran/pendistribusian tanpa merubah barang tersebut. Sub sektor perdagangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar mencakup kegiatan pembelian dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen atau importir ke pedagang besar lainnya, pedagang eceran, perusahaan, dan lembaga tidak mencari untung. Sedangkan perdagangan eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga tanpa merubah bentuk, baik barang baru maupun barang bekas.

Output/margin perdagangan merupakan selisih antara nilai jual dan nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Sedangkan biaya antara adalah seluruh biaya yang digunakan untuk kepentingan usaha perdagangan seperti perlengkapan tulis menulis, bahan pengepak/pembungkus, rekening listrik dan telepon, serta biaya iklan.

Pada umumnya penghitungan output subsektor perdagangan dilakukan dengan cara pendekatan arus barang yaitu dengan menghitung besarnya margin perdagangan barang-barang yang diperdagangkan dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri serta barang-barang dari impor. Sehingga dalam pendekatan ini dibutuhkan rasio margin perdagangan dan rasio jumlah barang yang diperdagangkan (*marketed surplus ratio*)

Secara sistematis penghitungan output dan nilai tambah bruto subsektor perdagangan dengan pendekatan arus barang adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung output sektoral (baik konstan maupun berlaku) untuk sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri dan impor
- b. Menghitung output (baik konstan maupun berlaku) subsektor perdagangan dengan mengalikan output sektoral dengan rasio margin perdagangan dan rasio barang yang diperdagangkan.
- c. Menghitung nilai tambah bruto (baik konstan maupun berlaku) subsektor perdagangan dengan mengalikan total output sektoral dengan rasio nilai tambah brutonya.

## **2. Sub sektor Hotel dan Penginapan**

Sub sektor Hotel dan Penginapan meliputi usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan/minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan.

Nilai output dihitung dengan cara menjumlahkan banyaknya malam kamar terpakai selama setahun dikalikan dengan rata-rata tarif malam kamar.

Nilai tambah bruto didapat dengan mengurangi biaya antara terhadap nilai produksi sedangkan nilai tambah neto dihitung dengan mengurangi nilai tambah bruto dengan nilai penyusutan.

Nilai tambah sektor perdagangan, hotel dan restoran diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah ketiga sub sektor diatas baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000.

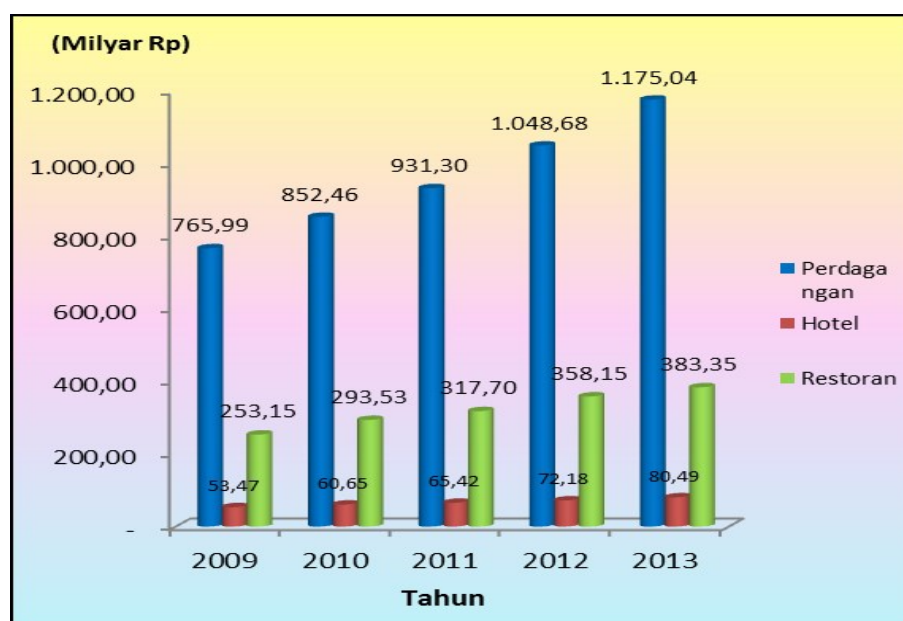
### 3 .Sub sektor Restoran / Rumah Makan

Sub sektor restoran mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi ditempat penjualan. Kegiatan yang termasuk dalam sub sektor ini seperti rumah makan, warung nasi, warung sate, warung kopi, katering, dan kantin.

Nilai tambah bruto sub sektor restoran baik di tempat tetap maupun tidak tetap (pedagang makanan keliling) diperoleh dengan pendekatan produksi. Indikator yang digunakan adalah jumlah tenaga kerja, jumlah restoran dan banyaknya pengunjung yang datang ke restoran. Sedangkan indikator harga yang digunakan adalah rata-rata output per tenaga kerja, rata-rata output per restoran dan rata-rata output per pengunjung.

Output restoran atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Sedangkan nilai tambah bruto dihitung berdasarkan perkalian rasio nilai tambah bruto dengan output. Output dan Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dengan ekstrapolasi dengan indeks produksi sebagai ekstrapolatornya. Berdasarkan hasil pengolahan, diperoleh NTBnya seperti tampak pada grafik berikut :

Grafik 4.13. NTB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di Kabupaten Magelang, 2009-2013 (Milyar Rupiah)



#### **4.10.7. Sektor Pengangkutan Dan Komunikasi**

Sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang, jasa penunjang angkutan dan komunikasi. Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkut/kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor.

Sub sektor pengangkutan secara umum digolongkan menjadi kegiatan angkutan darat (yang terdiri dari kegiatan angkutan kereta api dan angkutan jalan raya), angkutan sungai dan danau, angkutan laut serta angkutan udara. Jasa penunjang angkutan adalah suatu jenis kegiatan yang menunjang kegiatan pengangkutan seperti terminal/pelabuhan, keagenan, ekspedisi, bongkar muat, pergudangan dan jalan tol.

Sub sektor komunikasi meliputi kegiatan pengiriman berita/warta, telepon, telegram, teleks dan sejenisnya. Sebagian besar jasa pelayanan pengangkutan dan komunikasi ini ditujukan untuk kepentingan umum ini dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk seperti PT Telkom, PT Pos Indonesia, PT Kereta Api Indonesia dan lain-lain. Metode penghitungan sektor ini adalah dengan pendekatan produksi.

##### **1. Sub Sektor Pengangkutan**

Sub sektor pengangkutan adalah angkutan darat non kereta api dan jasa penunjang angkutan. Angkutan darat yang ada di wilayah Kabupaten Magelang meliputi kendaraan :

1. Bermotor seperti bus, minibus, truk, oplet dan ojek.
2. Tak bermotor seperti dokar, gerobak dorong/hewan, dan becak.

Pendekatan yang dipakai untuk menghitung outputnya adalah pendekatan produksi. Nilai tambah diperoleh dengan mengurangi besarnya biaya produksi masing-masing kegiatan. Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara ekstrapolasi yaitu sebagai ekstrapolatornya adalah jumlah penumpang/barang yang diangkut.

Sedangkan untuk jasa angkutan yang dicakup disini adalah kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar usaha pengangkutan meliputi pelayanan jasa terminal dan parkir, ekspedisi, keagenan, bongkar muat,

pergudangan dan kegiatan lain yang belum tercakup. Output atas dasar harga berlaku dari kegiatan jasa penunjang angkutan pada umumnya diperkirakan dengan pendekatan produksi yaitu perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga yang sesuai.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didapat dari hasil pengurangan output dengan biaya antara. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 diestimasi dengan metode deflasi dengan indeks sub kelompok transportasi dan komunikasi sebagai deflatornya.

## **2. Sub Sektor Komunikasi**

Dari pelaksanaan survei yang berkaitan dengan sub sektor ini, didapatkan data sebagai berikut :

### **a. Pos dan Giro**

- Jumlah pegawai berikut gaji serta tunjangan-tunjangan lainnya dan penerimaan lain-lain seperti lembur pegawai dan penerimaan yang berupa barang.
- Struktur usaha, penerimaan dan keluaran usaha seperti : penjualan benda-benda pos, wesel, paket dan lain-lain.

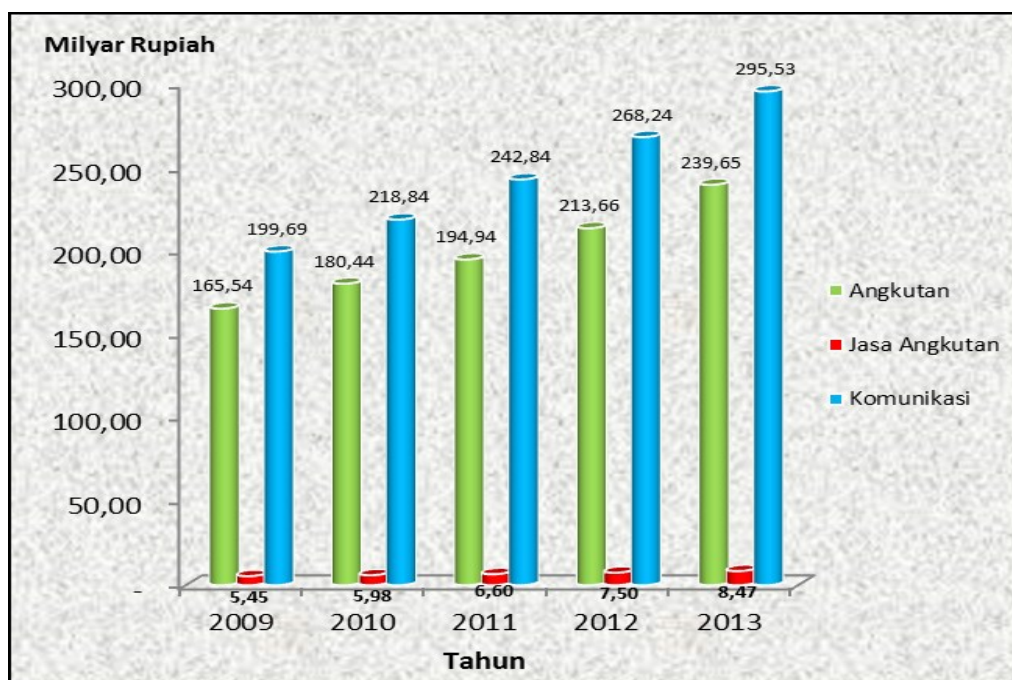
### **b. Telekomunikasi dan Jasa Telekomunikasi**

Pengumpulan data dari Kandatel Magelang diperoleh data antara lain :

- Jumlah pegawai berikut gaji dan penerimaan lainnya.
- Penerimaan dari pelanggan telepon dan pemakai jasa telepon se-Kabupaten Magelang.

Nilai tambah sektor angkutan dan komunikasi diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah ketiga sub sektor diatas baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000. Berdasarkan hasil pengolahan, diperoleh NTB sektor angkutan dan komunikasi seperti tampak pada grafik berikut :

Grafik 4.14. NTB Sektor Angkutan dan Komunikasi  
di Kabupaten Magelang, 2009-2013



#### 4.10.8. Sektor Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan

##### 1. Sub Sektor Perbankan

Perbankan adalah suatu kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kegiatan operasional bank yang meliputi: simpanan dalam bentuk giro dan tabungan, pemberian kredit, pembuatan rekening koran, pengiriman uang, menjual dan membeli surat-surat berharga, memberikan jaminan bank, menyewakan tempat menyimpan barang-barang berharga, melaksanakan kliring dan sebagainya.

Output sub sektor bank adalah seluruh penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, biaya pengiriman wesel dan sebagainya. Dengan demikian output bank mencakup imputasi jasa, penerimaan neto dari transaksi valuta, provisi dan komisi dan pendapatan operasional lainnya. Nilai tambah bruto diperoleh dengan mengurangi biaya antara terhadap outputnya.

## **2. Sub Sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank**

Yang termasuk lembaga keuangan bukan bank : Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pegadaian dan Koperasi.

- Perusahaan Asuransi, termasuk di dalamnya asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan asuransi kerusakan.
- Perusahaan Pegadaian, dalam hal ini yang termasuk didalamnya adalah perusahaan pegadaian milik pemerintah di Kabupaten Magelang.
- Koperasi Simpan Pinjam, data diperoleh dari PKPN Kab. Magelang

## **3. Sub Sektor Sewa Bangunan**

Sub sektor ini mencakup semua kegiatan jasa atas penggunaan bangunan baik sebagai tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Nilai produksi sewa bangunan tempat tinggal atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan jumlah bangunan tempat tinggal dengan rata-rata sewa rumah tahun 2013.

Nilai tambah bruto diperoleh dengan mengurangi nilai produksi dengan biaya antara. Hasil pengurangan nilai tambah bruto dengan penyusutan akan diperoleh nilai tambah neto. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh berdasarkan metode revaluasi dimana harga sewa rumah dihitung harga pada tahun 2000.

## **4. Sub Sektor Jasa Perusahaan**

Cakupan dari sub sektor jasa perusahaan meliputi kegiatan pemberian jasa hukum dan notaris, jasa akuntan dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa teknik dan arsitektur, jasa periklanan jasa riset dan jasa perusahaan lainnya. Semua jasa ini biasanya diberikan berdasarkan sejumlah bayaran atau kontrak.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan pendekatan produksi, yaitu perkalian antara indikator produksi (jumlah tenaga kerja/jumlah perusahaan) dengan indikator harga (rata-rata output per tenaga kerja/output per perusahaan).

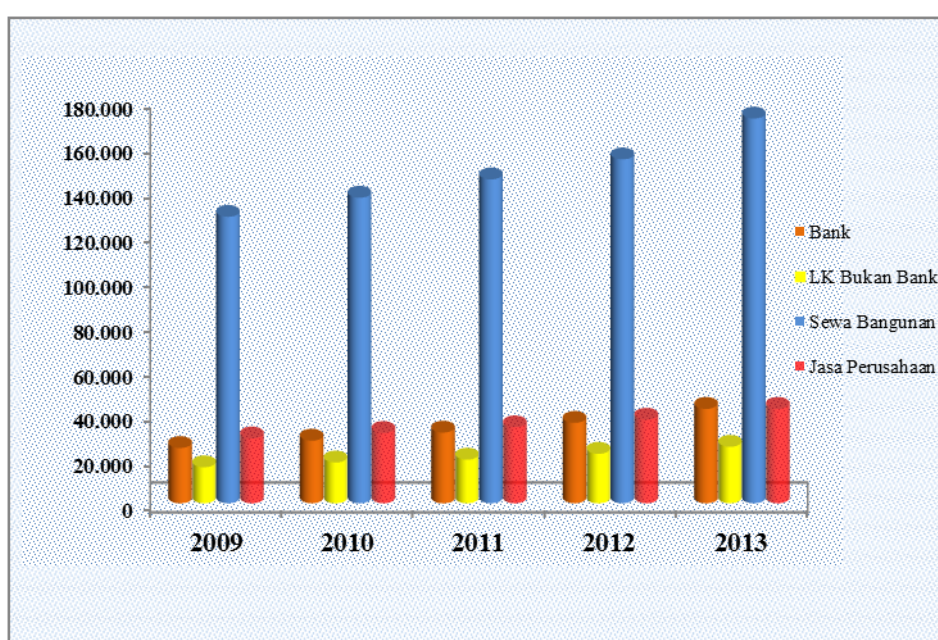
Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio nilai tambah bruto dengan output. Sedangkan output

dan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi menggunakan indeks aneka barang dan jasa sebagai deflatornya.

Nilai tambah sektor lembaga keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan merupakan penjumlahan nilai tambah ketiga subsektor tersebut, baik atas dasar berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000.

Adapun NTB sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan selama tahun 2013 di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

Grafik 4.15. NTB Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan di Kabupaten Magelang, 2009-2013 (Juta Rupiah)



#### 4.10.9. Sektor Jasa-Jasa

Sektor ini mencakup empat sub sektor yaitu sub sektor jasa pemerintahan umum dan sub sektor swasta.

##### 1. Sub Sektor Jasa Pemerintahan Umum.

Cakupan sub sektor jasa pemerintahan umum mencakup dua sub sub sektor yaitu adalah Jasa administrasi pemerintah dan pertahanan dan Jasa pemerintah lainnya. Meliputi seluruh pegawai negeri sipil, TNI dan Kepolisian yang benar-benar bekerja di wilayah Kabupaten Magelang.

Nilai tambah sub sektor jasa pemerintahan dan hankam terdiri dari upah



dan gaji rutin pegawai pemerintah pusat dan daerah serta TNI dan kepolisian, perkiraan komponen upah dan belanja pembangunan, ditambah dengan perkiraan penyusutan sebesar 5 persen. Data yang dipakai didasarkan pada realisasi pengeluaran pemerintah yang berupa anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

Data upah gaji pegawai negeri sipil pusat dan pegawai propinsi serta realisasi anggaran pembangunan pusat dan propinsi yang ada di Kabupaten Magelang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan DPPKAD Kabupaten Magelang.

Data upah gaji pegawai negeri sipil kabupaten dan realisasi anggaran pembangunan kabupaten diperoleh dari laporan keuangan pemerintah kabupaten (dari daftar K-2). Data upah gaji pegawai negeri sipil tingkat desa dan realisasi anggaran pembangunan desa diperoleh dari laporan keuangan pemerintah desa (daftar K-3).

Sebagaimana diketahui bahwa sektor Pemerintahan dan Hankam kurang bersifat riil, dengan kata lain lebih banyak berupa pelayanan kepada masyarakat, jaminan rasa aman, maka produksinya tidak dapat dihitung sehingga untuk memperoleh nilai produksi sektor ini memakai pendekatan pendapatan (*income aproach*). Cara menghitung sektor ini, khususnya dalam memperoleh gaji/upah seluruh pegawai, yaitu dengan menghitung upah dan gaji seluruh pegawai dalam satu tahun kalender. Sesuai dengan survei yang telah dilaksanakan bahwa penerimaan pegawai secara neto diperoleh dengan menambahkan 5% dari semua biaya pembangunan baik fisik maupun nonfisik ke dalam upah/gaji pegawai tersebut.

Ruang lingkup sektor ini tidak mengikutsertakan kegiatan perusahaan-perusahaan milik negara seperti Perum, PT Persero, Perusahaan Negara (PN) dan yang sejenis karena kegiatan lembaga ini telah tercakup dalam sektor yang bersangkutan sesuai dengan lapangan usaha masing-masing.

Untuk mendapatkan nilai tambah bruto maka nilai tambah neto seperti telah diuraikan pada halaman sebelumnya, perlu ditambah dengan penyusutan yang besarnya diperkirakan sebesar 5% dari nilai tambah neto. Untuk mendapatkan nilai tambah neto atas dasar harga konstan 2000, diperoleh dengan cara ekstrapolasi dimana sebagai ekstrapolatornya adalah jumlah pegawai pada tahun yang bersangkutan.

## **2. Sub Sektor Jasa Swasta**

Sub sektor ini ini mencakup jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi dan jasa perorangan dan rumah tangga. Berikut dijelaskan masing-masing sub dari sub sektor jasa swasta tersebut.

### **2.1 Jasa sosial kemasyarakatan**

Sub sektor ini mencakup kegiatan jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa sosial kemasyarakatan lainnya seperti palang merah, panti asuhan, panti wreda, yayasan pemeliharaan anak cacat, rumah ibadah dan sejenisnya, terbatas yang dikelola oleh swasta saja. Kegiatan-kegiatan sejenis yang dikelola oleh pemerintah tidak termasuk dalam sub sektor ini (sudah dicakup dalam sektor Pemerintahan dan Hankam).

Jasa pendidikan mencakup segala macam lembaga pendidikan swasta mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Termasuk disini kursus-kursus, seperti kursus menjahit, menari, montir, mengemudi dan lain sebagainya.

Jasa kesehatan mencakup segala macam lembaga kesehatan swasta baik berbentuk rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik dan sejenisnya. Termasuk disini pelayanan kesehatan atas usaha sendiri seperti dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, psikater, bidan, tukang gigi, dukun bayi dan sebagainya.

Output jasa pendidikan atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi yaitu perkalian antara indikator produksi (jumlah murid swasta menurut jenjang pendidikan) dengan indikator harga (rata-rata output per murid). Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian rasio nilai tambah bruto dengan outputnya. Sedangkan output dan nilai tambah bruto atas dasar konstan 2000 dihitung berdasarkan metode deflasi dengan indeks harga konsumen kelompok pendidikan sebagai deflatornya.

### **2.2 Jasa Hiburan dan Kebudayaan**

Kegiatan yang dicakup dalam sub sektor ini adalah seluruh kegiatan perusahaan/lembaga swasta yang bergerak dalam jasa hiburan, rekreasi

dan kebudayaan, seperti pembuatan dan distribusi film, usaha pemutaran film, penyiaran radio dan televisi, produksi dan pertunjukan sandiwara, tari, musik, serta jasa rekreasi lainnya seperti gelanggang pacuan, sirkus, taman hiburan dan klub malam. Juga termasuk disini penggubah lagu, penulis buku, pembuatan lukisan dan sebagainya.

Output dan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan laporan dari masing-masing kegiatan yang ada di Kabupaten Magelang. Output dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan menggunakan metode deflasi yaitu dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen sub kelompok rekreasi dan olah raga sebagai deflatornya.

### **2.3 Jasa Perorangan dan Rumah Tangga**

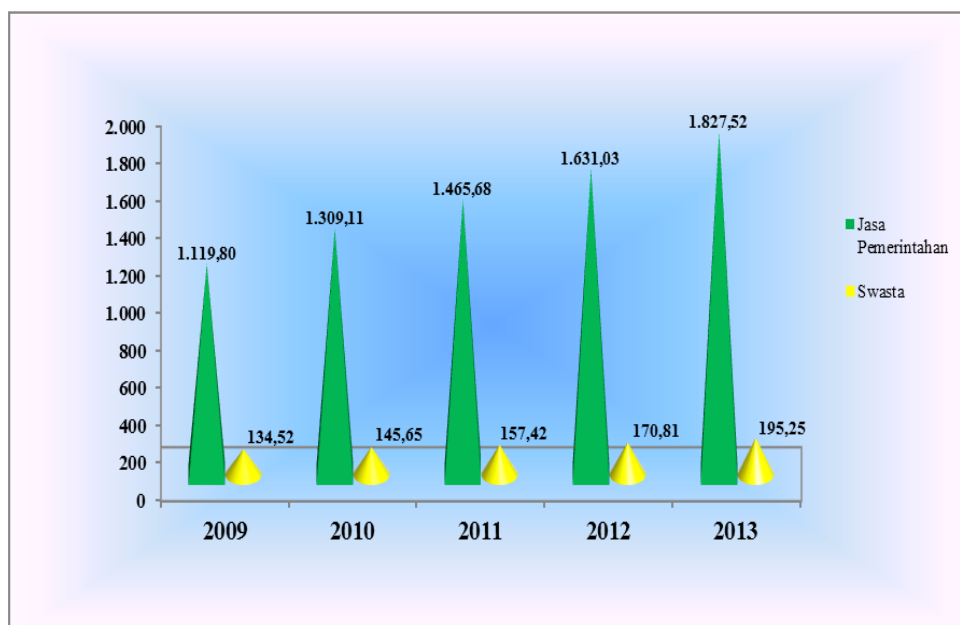
Sub sektor ini mencakup segala jenis kegiatan jasa yang pada umumnya melayani perorangan dan rumah tangga, terdiri atas :

- ✚ Jasa Perbengkelan/Reparasi kendaraan bermotor mencakup perbaikan kecil-kecilan dari kendaraan roda dua, tiga dan empat seperti mobil pribadi, mobil umum, bemo, sepeda motor dan sebagainya.
- ✚ Jasa Reparasi Lainnya seperti perbaikan/repair jam, TV, lemari es, mesin jahit, sepeda dan barang-barang rumah tangga lainnya.
- ✚ Jasa Pembantu Rumah Tangga termasuk koki, tukang kebun, penjaga malam pengasuh bayi dan anak dsb.
- ✚ Jasa perorangan lainnya seperti tukang binatu, pemangkas rambut, tukang jahit, tukang semir sepatu dan sandal, dan lain sebagainya.

Output dan nilai tambah bruto dilakukan dengan cara pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah barang/jasa yang dihasilkan. Output dan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan menggunakan metode deflasi dengan Indeks Harga Konsumen kelompok Aneka Barang dan Jasa sebagai deflatornya.

Nilai tambah sektor jasa-jasa merupakan penjumlahan dari nilai tambah kedua sub sektor tersebut diatas. Selama tahun 2013 NTB di sektor jasa-jasa mencapai 2.022,77 milyar rupiah.

Grafik 4.16. NTB Sektor Jasa-jasa di Kabupaten Magelang, 2009-2013 (Milyar Rupiah)



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagai penutup dari publikasi ini dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi utama dari perekonomian Kabupaten Magelang pada tahun 2013 ini masih di dominasi oleh sektor pertanian yakni sebesar 27,83 persen dari total PDRB sebesar 10,81 trilyun rupiah.
2. Hasil dari program pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 memberikan nilai tambah dengan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,60 persen.
3. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, nilai PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai 10,81 trilyun rupiah, naik 1,5 kali dari tahun 2009 (7,15 trilyun rupiah). Sedangkan menurut harga konstan mencapai 4,79 trilyun rupiah pada tahun 2013, mengalami kenaikan 1,2 kali dari tahun 2009 (3,94 trilyun rupiah).

# Lampiran

# Tabel Pokok

*Primary Table*



Tabel A  
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang  
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2009 - 2013  
(Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	2 101 208,47	2 374 670,52	2 523 850,92	2 757 335,485	3 010 214,807
1.1. Tanaman Bahan Makanan	1 617 453,86	1 858 336,77	1 959 213,57	2 153 490,672	2 353 155,16
1.2. Tanaman Perkebunan Rakyat	140 109,14	145 045,24	161 710,3	172 326,593	187 701,327
1.3. Peternakan & Hasil - hasil	204 370,04	222 162,44	241 442,82	261 872,61	285 766,681
1.4. Kehutanan	101 365,4	108 023,37	115 687,86	119 804,32	129 679,63
1.5. Perikanan	37 910,03	41 102,7	45 796,37	49 841,29	53 912,009
2. Pertambangan dan Penggalian	184 017,22	203 806,88	228 875,35	250 860,614	283 701,535
3. Industri Pengolahan	1 321 965,72	1 443 691,68	1 602 147,38	1 810 124,09	2 023 782,529
4. Listrik, Gas dan Air Minum	49 217,94	54 619,98	59 013,32	64 478,514	74 169,218
5. Bangunan / Konstruksi	599 542,34	665 087,71	745 656,97	834 813,913	936 046,74
6. Perdagangan, Restoran dan Hotel	1 072 598,31	1 206 640,33	1 314 423,13	1 479 010,31	1 638 870,465
7. Pengangkutan dan Komunikasi	370 681,63	405 250,61	444 376,89	489 396,01	543 650,496
8. Keuangan , Persewaan dan Jasa Perusahaan	197 496,43	213 796,89	229 365,52	248 702,52	281 086,654
9. Jasa - jasa	1 254 329,45	1 454 757,9	1 623 099,22	1 801 834,92	2 022 767,32
PDRB Kabupaten Magelang	7 151 057,51	8 022 322,5	8 770 808,7	9 736 556,376	10 814 289,764
PDRB Perkapita (Rupiah)	6 084 654,82	6 784 073,12	7 371 214,15	7 984 900,72	8 851 975,077

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang



Tabel B  
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang  
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2009 - 2013  
(Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	1 127 359,19	1 145 120,48	1 142 912,87	1 179 258,55	1 213 076,086
1.1. Tanaman Bahan Makanan	853 154,49	865 979,46	851 581,29	878 851,54	901 516,042
1.2. Tanaman Perkebunan Rakyat	71 802,97	72 180,8	76 984,72	79 927,76	83 351,217
1.3. Peternakan & Hasil - hasil	122 267,97	125 785,55	130 552,82	135 820,3	142 437,438
1.4. Kehutanan	57 310,14	57 905,99	59 034,64	58 454,27	58 723,374
1.5. Perikanan	22 823,62	23 268,68	24 759,4	26 204,68	27 048,016
2. Pertambangan dan Penggalian	107 011,64	115 123,12	125 092,78	132 992,83	140 505,541
3. Industri Pengolahan	738 829,99	766 616,23	794 597,72	841 170,15	894 905,717
4. Listrik, Gas dan Air Minum	20 506,14	22 199,82	23 212,99	24 561,94	26 622,469
5. Bangunan / Konstruksi	349 220,84	373 875,83	405 580,5	434 296,87	467 176,538
6. Perdagangan, Restoran dan Hotel	572 258,39	598 255,34	621 357,12	661 460,76	708 485,187
7. Pengangkutan dan Komunikasi	218 606,4	232 099,52	245 909,74	263 115,36	280 351,475
8. Keuangan , Persewaan dan Jasa Perusahaan	107 757,65	112 121,22	117 687,44	124 261,96	133 913,596
9. Jasa - jasa	697 214,44	750 978,51	816 003,29	881 770,24	932 282,404
PDRB Kabupaten Magelang	3 938 764,68	4 116 390,07	4 292 354,45	4 542 888,66	4 797 319,014
PDRB Perkapita (Rupiah)	3 351 395,72	3 481 023,26	3 607 405,54	3 725 600,051	3 926 818,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Tabel C  
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang  
Atas Dasar Harga Berlaku, 2009 - 2013  
( Persen )

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	29,38	29,60	28,79	28,31	27,83
1.1. Tanaman Bahan Makanan	22,62	23,16	22,33	22,11	21,75
1.2. Tanaman Perkebunan Rakyat	1,96	1,81	1,85	1,77	1,74
1.3. Peternakan & Hasil - hasilnya	2,86	2,77	2,75	2,69	2,64
1.4. Kehutanan	1,42	1,35	1,32	1,23	1,20
1.5. Perikanan	0,53	0,52	0,53	0,51	0,50
2. Pertambangan dan Penggalan	2,57	2,54	2,61	2,58	2,62
3. Industri Pengolahan	18,49	18,00	18,27	18,59	18,71
4. Listrik, Gas dan Air Minum	0,69	0,68	0,67	0,66	0,69
5. Bangunan / Konstruksi	8,38	8,29	8,50	8,57	8,66
6. Perdagangan, Restoran dan Hotel	15,00	15,04	14,99	15,19	15,16
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,18	5,05	5,07	5,03	5,03
8. Keuangan , Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,76	2,67	2,62	2,55	2,60
9. Jasa - jasa	17,54	18,13	18,51	18,51	18,70
PDRB Kabupaten Magelang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Tabel D  
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kab. Magelang  
Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2009 - 2013  
( Persen )

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	28,62	27,82	26,63	25,96	25,29
1.1. Tanaman Bahan Makanan	21,66	21,04	19,83	19,35	18,79
1.2. Tanaman Perkebunan Rakyat	1,82	1,75	1,79	1,76	1,74
1.3. Peternakan & Hasil - hasilnya	3,10	3,06	3,04	2,99	2,97
1.4. Kehutanan	1,46	1,41	1,38	1,29	1,23
1.5. Perikanan	0,58	0,57	0,58	0,58	0,56
2. Pertambangan dan Penggalan	2,72	2,80	2,91	2,93	2,93
3. Industri Pengolahan	18,76	18,62	18,51	18,52	18,65
4. Listrik, Gas dan Air Minum	0,52	0,54	0,54	0,54	0,56
5. Bangunan / Konstruksi	8,87	9,08	9,45	9,56	9,74
6. Perdagangan, Restoran dan Hotel	14,53	14,53	14,48	14,56	14,77
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,55	5,64	5,73	5,79	5,84
8. Keuangan , Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,74	2,73	2,75	2,74	2,79
9. Jasa - jasa	17,70	18,24	19,00	19,41	19,43
PDRB Kabupaten Magelang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Tabel E  
Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang  
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2009 - 2013

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	217,93	246,29	261,77	285,98	312,21
1.1. Tanaman Bahan Makanan	216,54	248,79	262,29	288,30	315,03
1.2. Tanaman Perkebunan Rakyat	225,86	233,82	260,68	277,80	302,58
1.3. Peternakan & Hasil - hasilnya	212,30	230,79	250,82	272,04	296,86
1.4. Kehutanan	247,97	264,25	283,00	293,07	317,23
1.5. Perikanan	210,26	227,97	254,00	276,44	299,02
2. Pertambangan dan Penggalian	303,58	336,23	377,59	413,86	468,04
3. Industri Pengolahan	262,46	286,62	318,08	359,37	401,79
4. Listrik, Gas dan Air Minum	433,57	481,16	519,86	568,01	653,37
5. Bangunan / Konstruksi	331,07	367,27	411,76	460,99	516,90
6. Perdagangan, Restoran dan Hotel	264,48	297,53	324,11	364,69	404,11
7. Pengangkutan dan Komunikasi	261,26	285,63	313,20	344,93	383,17
8. Keuangan , Persewaan dan Jasa Perusahaan	240,05	259,86	278,78	302,29	341,65
9. Jasa - jasa	369,12	428,10	477,64	530,24	595,25
PDRB Kabupaten Magelang	265,80	298,18	326,00	361,90	401,95

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Tabel F  
Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang  
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2009 -2013  
( Tahun 2000 = 100 )

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	116,93	118,77	118,54	122,31	125,82
1.1. Tanaman Bahan Makanan	114,22	115,93	114,01	117,66	120,69
1.2. Tanaman Perkebunan Rakyat	115,75	116,36	124,10	128,85	134,36
1.3. Peternakan & Hasil - hasilnya	127,01	130,67	135,62	141,09	147,97
1.4. Kehutanan	140,20	141,65	144,41	142,99	143,65
1.5. Perikanan	126,59	129,06	137,33	145,34	150,02
2. Pertambangan dan Penggalian	176,54	189,92	206,37	219,40	231,80
3. Industri Pengolahan	146,68	152,20	157,76	167,00	177,67
4. Listrik, Gas dan Air Minum	180,64	195,56	204,49	216,37	234,52
5. Bangunan / Konstruksi	192,84	206,46	223,97	239,82	257,98
6. Perdagangan, Restoran dan Hotel	141,11	147,52	153,21	163,10	174,70
7. Pengangkutan dan Komunikasi	154,08	163,59	173,32	185,45	197,60
8. Keuangan , Persewaan dan Jasa Perusahaan	130,97	136,28	143,04	151,03	162,77
9. Jasa - jasa	205,17	220,99	240,13	259,48	274,35
PDRB Kabupaten Magelang	146,40	153,00	159,54	168,85	178,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Tabel G  
Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang  
Atas Dasar Harga Berlaku, 2009 - 2013  
( Tahun Sebelumnya = 100 )

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	108,47	113,01	106,28	109,25	109,17
1.1. Tanaman Bahan Makanan	108,64	114,89	105,43	109,92	109,27
1.2. Tanaman Perkebunan Rakyat	109,81	103,52	111,49	106,57	108,92
1.3. Peternakan & Hasil - hasilnya	108,10	108,71	108,68	108,46	109,12
1.4. Kehutanan	105,09	106,57	107,10	103,56	108,24
1.5. Perikanan	107,69	108,42	111,42	108,83	108,17
2. Pertambangan dan Penggalian	109,63	110,75	112,30	109,61	113,09
3. Industri Pengolahan	107,22	109,21	110,98	112,98	111,80
4. Listrik, Gas dan Air Minum	107,83	110,98	108,04	109,26	115,03
5. Bangunan / Konstruksi	108,89	110,93	112,11	111,96	112,13
6. Perdagangan, Restoran dan Hotel	107,19	112,50	108,93	112,52	110,81
7. Pengangkutan dan Komunikasi	107,36	109,33	109,65	110,13	111,09
8. Keuangan , Persewaan dan Jasa Perusahaan	106,12	108,25	107,28	108,43	113,02
9. Jasa - jasa	111,85	115,98	111,57	111,01	112,26
PDRB Kabupaten Magelang	108,55	112,18	109,33	111,01	111,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Tabel H  
Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang  
Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2009 - 2013  
( Tahun Sebelumnya = 100 )

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	103,66	101,58	99,81	103,18	102,87
1.1. Tanaman Bahan Makanan	103,76	101,50	98,34	103,20	102,58
1.2. Tanaman Perkebunan Rakyat	105,78	100,53	106,66	103,82	104,28
1.3. Peternakan & Hasil - hasilnya	102,95	102,88	103,79	104,03	104,87
1.4. Kehutanan	101,23	101,04	101,95	99,02	100,46
1.5. Perikanan	103,54	101,95	106,41	105,84	103,22
2. Pertambangan dan Penggalan	107,47	107,58	108,66	106,32	105,65
3. Industri Pengolahan	103,28	103,76	103,65	105,86	106,39
4. Listrik, Gas dan Air Minum	104,40	108,26	104,56	105,81	108,39
5. Bangunan / Konstruksi	106,74	107,06	108,48	107,08	107,57
6. Perdagangan, Restoran dan Hotel	103,27	104,54	103,86	106,45	107,11
7. Pengangkutan dan Komunikasi	105,03	106,17	105,95	107,00	106,55
8. Keuangan , Persewaan dan Jasa Perusahaan	103,54	104,05	104,96	105,59	107,77
9. Jasa - jasa	107,96	107,71	108,66	108,06	105,73
PDRB Kabupaten Magelang	104,72	104,51	104,27	105,84	105,60

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Tabel I  
Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang  
Menurut Lapangan Usaha, 2009 - 2013

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	186,38	207,37	220,83	233,82	248,15
1.1. Tanaman Bahan Makanan	189,59	214,59	230,07	245,03	261,02
1.2. Tanaman Perkebunan Rakyat	195,13	200,95	210,06	215,60	225,19
1.3. Peternakan & Hasil - hasilnya	167,15	176,62	184,94	192,81	200,63
1.4. Kehutanan	176,87	186,55	195,97	204,95	220,83
1.5. Perikanan	166,10	176,64	184,97	190,20	199,32
2. Pertambangan dan Penggalian	171,96	177,03	182,96	188,63	201,91
3. Industri Pengolahan	178,93	188,32	201,63	215,19	226,14
4. Listrik, Gas dan Air Minum	240,02	246,04	254,23	262,51	278,60
5. Bangunan / Konstruksi	171,68	177,89	183,85	192,22	200,36
6. Perdagangan, Restoran dan Hotel	187,43	201,69	211,54	223,60	231,32
7. Pengangkutan dan Komunikasi	169,57	174,60	180,71	186,00	193,92
8. Keuangan , Persewaan dan Jasa Perusahaan	183,28	190,68	194,89	200,14	209,90
9. Jasa - jasa	179,91	193,71	198,91	204,34	216,97
PDRB Kabupaten Magelang	181,56	194,89	204,34	214,33	225,42

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang



Tabel J  
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang  
Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Berlaku, 2009 - 2013  
( Jutaan Rupiah )

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sektor Primer	2.285.225,69	2.578.477,40	2.752.726,27	3.008.196,10	3.293.916,34
Sektor Sekunder	1.970.726,00	2.163.399,37	2.406.817,67	2.709.416,52	3.033.998,49
Sektor Tertier	2.895.105,82	3.280.445,73	3.611.264,76	4.018.943,76	4.486.374,93
<b>P D R B</b>	<b>7.151.057,51</b>	<b>8.022.322,50</b>	<b>8.770.808,70</b>	<b>9.736.556,38</b>	<b>10.814.289,76</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Tabel K  
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang  
Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2009 - 2013  
( Jutaan Rupiah )

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sektor Primer	1.234.370,83	1.260.243,60	1.268.005,65	1.312.251,38	1.353.581,63
Sektor Sekunder	1.108.556,97	1.162.691,88	1.223.391,21	1.300.028,96	1.388.704,73
Sektor Tertier	1.595.836,88	1.693.454,59	1.800.957,59	1.930.608,32	2.055.032,66
<b>P D R B</b>	<b>3.938.764,68</b>	<b>4.116.390,07</b>	<b>4.292.354,45</b>	<b>4.542.888,66</b>	<b>4.797.319,01</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

